



MAKNA ORGANISASI
BOEDI OETOMO
UNTUK HARI INI DAN ESOK



MAKNA ORGANISASI
BOEDI OETOMO
UNTUK HARI INI DAN ESOK

MAKNA ORGANISASI BOEDI OETOMO UNTUK HARI INI DAN ESOK

Kumpulan Makalah
Seminar Tahun 2013

Penyunting :
Isnudi

Diterbitkan :
Museum Kebangkitan Nasional
Direktorat Jenderal Kebudayaan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

ISBN 978-602-14482-1-2

Cetakan Pertama, 2013

KATA SAMBUTAN

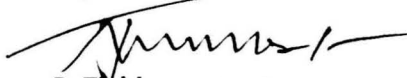
Puji syukur dipanjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena berkat karunia dan petunjuk-Nya penyusunan buku **MAKNA ORGANISASI BOEDI OETOMO UNTUK HARI INI DAN ESOK (Kumpulan Makalah Seminar Nasional Tahun 2013)** rampung sesuai dengan waktu yang direncanakan.

Buku ini memuat informasi dan pengetahuan tentang dinamika organisasi Budi Utomo yang ditulis oleh para sejarawan dari Universitas Sumatera Utara, Universitas Indonesia, Universitas Padjajaran, Universitas Gajah Mada dan Universitas Negeri Surakarta. Museum Kebangkitan Nasional berusaha menyampaikan informasi dan pengetahuan tersebut kepada masyarakat untuk dijadikan sebagai pengetahuan bersama.

Meskipun materi dalam buku ini sudah diseminarkan dihadapan sejarawan, dosen, mahasiswa, guru sejarah dan keluarga pahlawan tidak menutup adanya kesalahan, karena itu masukan dan saran masih diperlukan untuk kesempurnaan buku ini.

Jakarta, September 2013

Kepala Museum Kebangkitan Nasional



R. Tjahjopurnomo

NIP.195912271988031001

KATA PENGANTAR

School tot Opleiding van Inlandsche Artsen (STOVIA) atau Sekolah Dokter Bumi Putera menjadi bagian penting dalam lintasan sejarah bangsa Indonesia, karena banyak peristiwa Sejarah Nasional Indonesia terkait dengan lembaga pendidikan tersebut. Sejak berdiri tahun 1902 STOVIA menjadi lembaga pendidikan yang berkualitas, karena menerapkan kurikulum yang sama dengan negara-negara Eropa. Lulusan STOVIA berhak menyandang gelar *Inlandsche Arts* (Dokter Bumiputera) yang memiliki kewenangan sama dengan dokter-dokter dari negeri Belanda.

Gedung STOVIA yang saat ini menjadi Museum Kebangkitan Nasional menjadi salah satu tempat bersejarah pada masa kebangkitan nasional Bangsa Indonesia. Tanggal 20 Mei 1908 bertempat di ruang Anatomi, pelajar STOVIA dibawah pimpinan Soetomo mendeklarasikan berdirinya organisasi Budi Utomo yang akan dijadikan sebagai alat perjuangan untuk mengusir penjajahan.

Pelajar STOVIA menilai perjuangan fisik yang selama ini dilakukan oleh pahlawan-pahlawan bangsa selalu berakhir dengan kegagalan, karena itu perlu dicoba perjuangan dalam bentuk baru dengan memanfaatkan kekuatan pemikiran. Kombinasi perjuangan dengan kekuatan fisik dan perjuangan melalui pemikiran diharapkan bisa mempercepat proses kemerdekaan bangsa Indonesia, sehingga masyarakat akan segera terbebaskan dari belenggu penjajahan.

Organisasi Budi Utomo dibawah pimpinan Soetomo menjadi pelopor dan inspirator perjuangan melawan penjajahan dengan kekuatan pemikiran, sehingga organisasi-organisasi pergerakan yang muncul pada masa berikutnya memiliki hubungan dengan Budi Utomo. Haji Samanhudi sebelum mendirikan Sarekat Dagang Islam menjadi anggota Budi Utomo cabang Surakarta, Cipto Mangunkusumo sebelum mendirikan *Indische Partij* menjabat sebagai pengurus Budi Utomo,

demikian juga halnya dengan K.H Ahmad Dahlan sebelum mendirikan Muhammadiyah aktif menjadi anggota Budi Utomo cabang Yogyakarta.

Peran penting Budi Utomo dalam Sejarah Nasional Indonesia diuraikan dalam Seminar Nasional di Museum Kebangkitan Nasional pada tanggal 6 Juli 2013. Makalah-makalah dalam seminar tersebut bisa dijadikan sebagai sumber pengetahuan dan perenungan, karena itu diterbitkan dalam bentuk buku dengan judul **MAKNA ORGANISASI BUDI UTOMO UNTUK HARI INI DAN ESOK** (Kumpulan Makalah Seminar Nasional Tahun 2013).

Makalah pertama ditulis oleh Djoko Marihandono dengan judul ***Budi Utomo: Masih Relevankah Untuk Masa Kini?*** menguraikan secara kronologis peran Dokter Soetomo sebagai dokter dan tokoh pergerakan. Aktifitas Dokter Soetomo mencakup spektrum yang sangat luas, karena itu hanya dibatasi pada aktifitas kehidupan politik dan sosial. Dokter Soetomo dalam beraktifitas selalu berpedoman pada delapan prinsip kehidupan, yang semuanya bermuara pada semangat persatuan sebagai sumber semua tindakannya.

Makalah dengan judul ***Budi Utomo: Dulu, Kini dan Esok*** yang ditulis oleh Reiza D. Dienaputra, menegaskan tentang kedudukan Budi Utomo sebagai organisasi modern pertama di tanah air. Budi Utomo yang didirikan oleh pelajar STOVIA menawarkan strategi baru dalam melawan penjajahan, sehingga dijadikan model oleh organisasi-organisasi pergerakan yang muncul pada masa berikutnya. Peran pelajar STOVIA pendiri Budi Utomo mengajarkan tentang pentingnya kepekaan sosial dan kesadaran untuk menempatkan kepentingan masyarakat luas diatas kepentingan kelompok.

Makalah Suhartono W. Pranoto dengan judul ***Budi Utomo: Menolak Jaman Edan Membangun Kebangsaan*** menegaskan kembali tentang kedudukan Budi Utomo sebagai organisasi pergerakan pertama di tanah air. Kelahiran Budi Utomo mendorong lahirnya organisasi-organisasi politik yang berdampak pada perkembangan demokrasi

dan kebangsaan Indonesia. Budi Utomo mengusung jiwa kemajuan melalui pendidikan sebagai cara untuk mempercepat terciptanya kemerdekaan.

Sejarah perjuangan Budi Utomo menjadi memori kolektif bangsa, karena menumbuhkan kesadaran kolektif masyarakat untuk melakukan perubahan. Kalimat tersebut menjadi pengantar makalah Warto dengan judul ***Kebangkitan Nasional Menuju Indonesia Baru: Belajar dari Budi Utomo***. Dinamika dalam organisasi Budi Utomo pada masa kebangkitan nasional dipengaruhi oleh sikap tiga tokoh utamanya. Sikap Soetomo yang moderat menjadikan Budi Utomo mampu bertahan lama, Suwardi Suryaningrat yang semula bersikap radikal dan kemudian lebih moderat mewarnai gerakan Budi Utomo yang mandiri dan bebas, dan sikap Cipto Mangunkusumo yang mengagungkan hak asasi individu sebagai sarana menyelamatkan rakyat Indonesia dari ketertindasan menjadi dasar Budi Utomo berubah menjadi organisasi politik pada masa berikutnya.

Makalah terakhir ditulis oleh Suprayitno dengan judul ***"Jejak Budi Utomo di Tanah Deli Sumatera Timur"***. Makalah ini semakin menegaskan bahwa Budi Utomo tidak terpusat di Jawa saja, karena cabang-cabang Budi Utomo di tanah Deli Sumatera Timur berkembang lebih cepat dibandingkan di tanah Jawa. Budi Utomo menjadi organisasi pertama yang menyuarakan pembelaan kepada para kuli kontrak di perkebunan Sumatera Timur, dengan menuntut penghapusan *Poenale Sanctie* dan perbaikan kondisi kuli-kuli di perkebunan. Budi Utomo juga mendirikan sekolah-sekolah dengan sistem pendidikan sama dengan sekolah-sekolah yang dibangun oleh pemerintah, sehingga lulusan sekolah Budi Utomo memiliki kemampuan yang sama dengan murid dari sekolah pemerintah.

Dinamika organisasi Budi Utomo pada masa kebangkitan nasional mampu menyadarkan masyarakat tentang pentingnya persatuan dan pendidikan sebagai sarana untuk menciptakan kemerdekaan, sehingga

tepat kiranya jika Presiden Soekarno memperingati hari kelahirannya sebagai Hari Kebangunan Nasional pada tahun 1948.

Budi Utomo memang hanyalah sebuah *kriwikan* kecil dalam sejarah kebangkitan bangsa Indonesia, tetapi Budi Utomo menjadi pelopor perjuangan dalam bentuk baru. Budi Utomo menjadi sumber munculnya *grojogan* besar perlawanan dengan kekuatan pemikiran yang mampu merobohkan bangunan pemerintah kolonial yang sudah bercokol sangat lama. Van Deventer menuliskan kelahiran Budi Utomo dalam majalah *De Gids* dengan kata *"Het Wonder is geschied, Insulinde de schoone slaapter, is ontwaakt* artinya *Sesuatu yang ajaib telah terjadi. Insulinde, putri cantik yang tidur sudah terbangun.*

DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vii
BAB I BOEDI OETOMO: MASIH RELEVANKAH UNTUK MASA KINI?	
Djoko Marihandono	1
LATAR BELAKANG	1
SOETOMO SEBAGAI DOKTER.....	5
PERGERAKAN DI SURABAYA	8
DELAPAN GAGASAN DR. SOETOMO	14
RELEVANSI BO PADA MASA KINI	18
KESIMPULAN.....	20
DAFTAR PUSATAKA	24
BAB II BUDI UTOMO: DULU, KINI, DAN ESOK	
Reiza D. Dienaputra	25
MENJELAJAHI BUDI UTOMO	27
MAKNA KEHADIRAN BUDI UTOMO	32
BUDI UTOMO DALAM BINGKAI KONTEMPORER.....	34
DAFTAR SUMBER.....	40
BAB III BUDI UTOMO : MENOLAK “JAMAN EDAN”	
MEMBANGUN KEBANGSAAN	
Suhartono W. Pranoto	41
PENGANTAR	41
BUMIPUTRA VS KOLONIAL	43
MERESPON KRISIS ZAMAN	46
MEMBANGUN KEBANGSAAN.....	47
FUTURISTIK.....	49

CATATAN KESIMPULAN	51
BIBLIOGRAFI	52
BAB IV KEBANGKITAN NASIONAL MENUJU INDONESIA BARU:	
BELAJAR DARI BUDI UTOMO	
Warto	55
KESADARAN KOLEKTIF	58
PEMBARUAN SOSIAL	61
CATATAN AKHIR	66
REFERENSI	68
BAB V JEJAK BUDI UTOMO DI TANAH DELI SUMATERA TIMUR	
Suprayitno	69
PENGANTAR	69
GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI SUMATERA TIMUR.....	70
BUDI UTOMO DI SUMATERA TIMUR	75
“BUDI UTOMO” MODERN DAN PROBLEM MASA KINI.....	82

BAB I

BOEDI OETOMO: MASIH RELEVANKAH UNTUK MASA KINI?

Djoko Marihandono¹

1. LATAR BELAKANG

Dari pelajaran di sekolah, kita telah mengenal apa yang dimaksudkan sebagai perkumpulan Boedi Oetomo (atau disingkat BO). BO adalah sebuah perkumpulan non politik dan non profit didirikan oleh Soetomo, dan kawan-kawan pada 20 Mei 1908 di Sekolah Dokter Bumi Putera STOVIA (*School Tot Opleiding Van Inlandsche Artsen*), Weltevreden, Batavia. Sebagai pemuda yang mencintai rakyatnya, para siswa STOVIA sering berkumpul untuk membicarakan bagaimana menyelesaikan masalah diskriminasi yang menimpa masyarakat bumi putra. Kondisi inilah yang menggugah Soetomo dan kawan-kawan untuk bertindak, berbuat sesuatu guna membantu masyarakat di sekitarnya yang masih jauh dari kata sejahtera.

Akhir tahun 1907, Dr. Wahidin Soedirohoesodo, seorang pensiunan dokter yang juga iba terhadap masyarakat di sekelilingnya, mencoba untuk melakukan propaganda untuk mengumpulkan uang yang nantinya digunakan untuk membantu kaum bumi putra yang pandai namun tidak memiliki biaya untuk melanjutkan sekolahnya ke jenjang yang lebih tinggi. Dalam perjalanannya ke Banten, Dr. Wahidin Soedirohoesodo singgah di STOVIA. Kesinggahannya itu juga untuk mengajak kaum muda, kaum pemimpin bangsa di masa depan, untuk

¹ Penulis adalah pengajar tetap di Departemen Sejarah Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia. Selain mengajar, penulis juga aktif dalam meneliti. Kompetensi penulis adalah Sejarah Hubungan antara Wilayah Koloni dan Negara Induk pada awal abad XIX. Penulis dapat dihubungi dengan email djoko_marihandono@yahoo.com

peka terhadap kondisi masyarakat di luar tembok sekolah mereka, yang menderita akibat penjajahan di negeri ini. Gagasan ini disambut dengan penuh antusiasme oleh para siswa STOVIA. Mereka sering mengadakan diskusi yang semula membahas tentang pendidikan bagi kaum bumi putra hingga akibat-akibat langsung maupun tidak langsung yang disebabkan oleh kaum penjajah.

Diskusi yang dilakukan secara intens dan kontinu ini, akhirnya memunculkan gagasan dalam benak Soetomo untuk mendirikan suatu perkumpulan yang bergerak di bidang sosial. Gagasan ini memperoleh sambutan yang hangat tidak hanya dari siswa-siswa seangkatannya di STOVIA, tetapi juga dari siswa-siswa angkatan di atas maupun di bawahnya. Akhirnya, para siswa ini bersepakat untuk berkumpul pada hari Rabu 20 Mei 1908 pukul 9 pagi di ruang anatomi STOVIA untuk berembuk tentang pendirian suatu perkumpulan. Pertemuan itu diawali oleh penjelasan Soetomo tentang maksud dan tujuan mereka berkumpul di ruang itu. Ia kemudian mengemukakan gagasan dan cita-citanya secara ringkas dan jelas. Penjelasan Soetomo ini disambut positif oleh rekan-rekannya, yang mendesak agar segera didirikan organisasi itu.² Saat ini juga disepakati untuk mendirikan suatu perkumpulan diberi nama Boedi Oetomo, suatu perkumpulan yang nantinya akan menginspirasi berdirinya organisasi-organisasi di tanah air. Para peserta pertemuan itu sepakat untuk memilih tokoh-tokoh berikut untuk menjadi pengurus BO, sampai dengan diselenggarakannya kongres. Kepengurusan BO pada saat itu diserahkan kepada:

Ketua	: R. Soetomo
Wakil Ketua	: M. Soelaiman
Sekretaris I	: Soewarno
Sekretaris II	: Goenawan Mangoenkoesoemo

² Tercatat sebanyak 17 siswa di kelas Soetomo, 11 orang kakak kelas, dan 20 adik kelas yang menghadiri rapat pembentukan B O. (lihat Roeslan Abdulgani (1976), halaman 20-21.

Bendahara : R. Angka
Komisaris : M. Soewarno, M. Mohamad Saleh, dan
M. Goembrek

Berita tentang berdirinya perkumpulan itu segera menyebar ke segala penjuru, walaupun dilakukan secara diam-diam. Kehadiran BO itu disambut oleh para pelajar dari kota lain seperti Bogor, Bandung, Semarang, Yogyakarta dan Magelang.



Foto 1. Gedung Stovia di Weltevreden (Koleksi MUSKITNAS).

Sambutan yang begitu besar terhadap berdirinya BO, tidak memungkinkan lagi bagi pengurus perkumpulan itu untuk mengelola secara baik, karena para pengurusnya semuanya belum tamat belajarnya di STOVIA. Selain itu, karena mereka semua tinggal di asrama, tidak memungkinkan bagi mereka untuk keluar masuk asrama guna mengurus organisasi ini. Bahkan Direktur STOVIA H.F. Roll bersama para guru sempat menegur para pengurus BO agar jangan terlalu aktif di organisasi karena sangat mengganggu proses belajar mengajar mereka. Namun, direktur STOVIA dapat menyadarkan para pengajar tentang semangat para siswa yang tergabung dalam BO ini.

Mengingat banyaknya dukungan dan simpati kepada perkumpulan ini, maka diputuskan untuk segera mengadakan Kongres BO yang pertama. Kongres pertama diselenggarakan di kota Yogyakarta pada 3, 4 dan 5 Oktober 1908. Dalam Kongres Pertama BO di Yogyakarta, hadir 400 peserta yang datang dari berbagai kota, seperti: Bogor, Bandung, Magelang, Surabaya, Probolinggo dan Yogyakarta.³ Di samping para pemuda yang datang dari berbagai daerah, kongres tersebut juga dihadiri oleh para pejabat di lingkungan kraton Pakualaman, para pejabat Belanda, para bupati Temanggung, Blora, dan Magelang.

Hasil kongres I BO telah menetapkan beberapa tokoh untuk duduk dalam kepengurusan, antara lain:

Ketua	: R.T. Arya Tirtakoesoema
Wakil Ketua	: Dr. Wahidin Soedirohoesodo
Anggota	: Dwidjosewojo dan Dr. Tjipto Mangoenkoesoemo

Terbentuknya organisasi BO merupakan kebangkitan kaum priyayi Jawa yang dianggap sebagai bangkitnya sikap keperwiraan dan kekesatriaan kaum priyayi.

Perbedaan pendapat yang ada di dalam kepengurusan BO antara Dr. Tjipto Mangoenkoesoemo dan pengurus BO lainnya terutama berasal dari keinginan Dr. Tjipto untuk memperluas keanggotaan BO, agar pemuda di luar Jawa dapat ikut bergabung di dalamnya. Usulannya untuk sementara belum dapat diterima karena dianggap terlalu radikal. Oleh karena itu, Dr. Tjipto Mangoenkoesoemo menyatakan diri keluar dari BO. Baru pada 1912, Dr. Tjipto bersama dengan Douwes Dekker (redaktur surat kabar *Bataviaasch Nieuwsblad*) dan Ki Hadjar Dewantoro membentuk *Indische Partij*, suatu organisasi politik yang bercita-cita membangun bangsa yang baru yang lebih luas. *Indische*

³ Lihat Roeslan Abdulgani (1976) halaman 25.

Partij (IP) menerima anggotanya tidak terbatas pada penduduk Jawa saja, tetapi juga Sumatera, Ambon, Minahasa, baik yang bumi putra maupun yang non-bumi putera. Slogan dari partai baru ini adalah *Het land dat gij voedt, zij het land dat gij hoedt*. ('Negeri yang menghidupi kamu adalah Tanah Airmu yang harus kamu bela').⁴

Sewaktu diberlakukannya Politik Etis, di wilayah koloni Hindia Belanda diberlakukan undang-undang yang baru. BO tetap diizinkan untuk melanjutkan kegiatannya, sementara IP dilarang, bahkan pengurusnya (Douwes Dekker, Dr. Tjipto Mangoenkoesoemo dan Ki Hadjar Dewantoro) ditangkap dan dibuang. Sementara untuk *Serikat Islam* (SI), pemerintah kolonial banyak memberikan pertimbangan. Satu persatu cabang-cabang SI diperiksa. Pengesahan dan hak berdiri diberikan untuk SI di daerah, sementara di pusat, izinnya ditangguhkan.

2. SOETOMO SEBAGAI DOKTER

Setelah lulus dari STOVIA, Dr. Soetomo diwisuda bersama-sama dengan enam sahabatnya pada 1911.⁵ Setelah diwisuda, ia harus segera menempati posnya di Semarang, karena di kota itu berjangkit penyakit pes. Setahun setelah itu ia ditugaskan ke kota Tuban untuk menangani kasus yang sama. Setelah bertugas selama satu tahun di kota itu, ia ditugaskan ke Lubuk Pakam yang merupakan penempatan pertama posnya di luar Jawa. Pada bulan Mei 1913, di sana ia sempat

⁴Lihat Roeslan Abdulgani (1976) halaman 30. Pada 1912 juga berdiri Sarekat Islam (SI) dan Muhammadiyah. *Indische Partij* (IP) dianggap sebagai organisasi yang memperjuangkan nasionalisme, sementara SI dan Muhammadiyah merupakan organisasi keislaman.

⁵Pada 18 April 1911, *De Soematra Post* mangabarkan bahwa baru saja STOVIA meluluskan 6 orang siswanya, yakni Raden Soetomo, Mas Goenawan, J. Latumeten, Raden Slamet, Mas Mohammad Saleh dan mas Gumbrek. Lihat *De Sumatra Post*, 18 April 1911, halaman pertama.

membentuk cabang BO cabang Medan, yang ketuanya adalah dia sendiri.⁶

Setelah dianggap berhasil menangani wabah pes di Lubuk Pakam, ia dipindahtugaskan ke kota Malang, karena di kota ini muncul epidemi pes yang menimpa masyarakat Malang dan sekitarnya. Namun, tidak lama di kota Malang, ia harus kembali ke Batu Raja, yang masyarakatnya mengalami epidemi yang sama. Karena luasnya wilayah yang terjangkau epidemi pes, ia bertugas di kota itu hingga 1917. Selama beberapa tahun di kota itu, ia sempat mengikuti kegiatan perkumpulan *Among Bongso*, yang anggotanya terdiri atas para pejabat bumi putra maupun Eropa dan orang lain yang menghendaki kemajuan bangsanya. Berkaitan dengan statusnya sebagai sekretaris perkumpulan itu, ia sempat mengunjungi beberapa kota di Sumatera Barat. Dari pengalaman inilah, ia memperoleh kesan bahwa pegawai bumi putera belum diberikan kesempatan yang sama dibandingkan dengan pegawai Eropa. Oleh karena itu, hampir semua pegawai *Pangreh Praja* tidak berkembang, tidak dapat mandiri, selalu tergantung dari kebijakan pemerintah kolonial.



Foto 2. Rumah Sakit Zending di Malang tempat Dr. Soetomo bekerja
(Sumber : KITLV 82774)

⁶Lihat *Bataviaasch Nieuwsblad* terbitan 27 Mei 1913, halaman 1.

Pada 1917, setelah epidemi pes di kota itu reda, Dr. Soetomo dimutasikan ke Blora untuk bekerja di rumah sakit milik *zending*.⁷ Sebagai dokter di rumah sakit itu, ia merasakan kekurangan tenaga perawat. Kemudian, didatangkan seorang perawat dari Belanda yang bernama Suster de Graff, yang memiliki nama kecil Everdina Bruring. Kelak perawat tersebut dipinang untuk dinikahinya.

Pada 1919, ia memperoleh beasiswa untuk melanjutkan studinya di Belanda. Bersama isterinya ia tinggal di sana selama empat tahun. Dr. Soetomo melanjutkan di Universitas Amsterdam. Setelah lulus dari universitas itu di bidang dermatologi, ia membuka praktek bersama Prof. S. Mendes da Costa, seorang dokter ahli penyakit kulit dan kelamin sebelum melanjutkan pendidikan spesialisnya di Jerman.

Selama di Belanda, kegiatan Dr. Soetomo tidak hanya sekadar belajar, namun juga aktif dalam beberapa organisasi. Bersama dengan pelajar dari Hindia Belanda lainnya, ia selalu berdiskusi dan berdebat tentang kemajuan bangsanya. Ia kemudian bergabung dengan *Indische Vereeniging* suatu perkumpulan yang telah didirikan oleh para pelajar Hindia Belanda yang belajar di negeri Belanda. Perkumpulan ini kemudian diubah namanya menjadi *Indonesische Vereeniging* yang diketuai oleh Dr. Soetomo, karena para pelajar itu tahu Dr. Soetomolah yang mendirikan BO. (Selanjutnya pada 1925 nama *Indonesisch*

⁷ Dr. Soetomo tertarik akan pengalaman pribadi Suster de Graff. Sebelum menikah, semula Dr. Soetomo ingin meninggalkan semua aktivitasnya agar “dianggap” sebagai orang Belanda. Namun hal ini dilarang oleh isterinya. Dr. Soetomo diminta untuk tetap berjuang demi bangsanya. (Lihat Paul W. van der Veur (ed), halaman 188—190). Mengetahui adiknya menikah dengan orang pribumi, kakak Suster de Graff yang memiliki nama kecil Everdina Bruring yang tinggal di Semarang tidak mengakuinya sebagai adik lagi, karena menikah dengan bumi putra dianggap hina. Kondisi ini menimbulkan reaksi dari banyak pihak. Baik kawan maupun lawan politiknya. Ada yang pro, dan ada pula yang kontra atas pernikahan itu. Pihak yang menyetujuiinya berargumentasi karena perkawinan ini dilaksanakan secara Islam. Sementara pihak yang kontra kontra menyayangkan karena kehilangan tokoh pergerakan ini. Sementara itu ada pula pihak yang mencemoohkannya.

Vereeningin diubah namanya menjadi *Perhimpoean Indonesia*). Dr. Soetomo juga mendirikan Serikat Dokter Hindia cabang Amsterdam yang diketuai oleh Dr. Sitanala, Dr. Soetomo sebagai sekretaris, dan sebagai bendahara Dr. Slamet.⁸ Pada 1923, Dr. Soetomo dan isterinya kembali ke tanah air untuk memulai tugasnya yang baru.

3. PERGERAKAN DI SURABAYA

Sekembalinya dari Belanda, Dr. Soetomo memperoleh tugas yang baru di rumah sakit Simpang Surabaya (CBZ). Selain bekerja sebagai dokter penyakit kulit dan kelamin di rumah sakit itu, ia juga mendapatkan tugas tambahan sebagai pengajar di Sekolah Kedokteran di Surabaya NIAS (*Nederlandsche-Indische Artsen School*) dengan waktu mengajar dua kali per minggu dalam bidang penyakit kulit dan kelamin.⁹ Walaupun sudah mengemban tugas yang berat di siang hari, Dr. Soetomo masih membuka praktik di rumahnya. Pada malam harinya, ia masih menyempatkan diri mengurus organisasi dan berdiskusi atau memberikan ceramah tentang pergerakan.

Dalam kesibukannya itu, ia masih mengamati perkembangan BO yang dia rasakan sudah tidak relevan lagi dengan kondisi saat itu, yang berorientasi hanya pada kegiatan kaum priyayi. Masih banyak pemuda dari daerah atau pulau lain yang menghendaki bergabung dengan organisasi yang berada di luar kelompok ekstrem. Oleh karena itu ia merencanakan mendirikan lembaga studi yang dikenal dengan nama *Sudie club*. Organisasi ini diharapkan menampung intelektual baik tua maupun muda, dan tidak terbatas pada golongan tertentu. Akhirnya pada hari Jumat, 11 Juli 1924, di rumah RM Soejono di Palmelaan diadakan rapat pembentukan *Indonesische Studie Club*. Rapat itu dihadiri kurang lebih 30 peserta, termasuk wakil dari Partai Serikat

⁸Lihat *Bataviaasch Nieuwsblad*, 7 Agustus 1922, halaman 1.

⁹Lihat *De Indisch Courant*, 9 Juli 1923, halaman 1.

Islam (PSI). Ada pun tujuan didirikannya *Indonesische Studie Club* adalah sebagai berikut:

- a. Mendorong kaum pelajar bumi putra ke arah persatuan dan pemahaman politik;
- b. Mengajak kaum pelajar dan masyarakat bumi putera untuk bekerja secara konstruktif dengan cara mencari solusi terhadap persoalan nasional dan sosial.

Tujuan didirikannya institusi ini tidak hanya terbatas pada pendidikan formal saja, tetapi juga menyediakan asrama untuk pelajar, menyediakan balai latihan kerja bagi kaum wanita, dan sekolah menenun.

Institusi ini diminati oleh banyak orang, sehingga beberapa koran menurunkan laporan khusus tentang pendiriannya seperti koran *Sin Jit Po* yang menurunkan laporan khusus tentang pendirian institusi ini. Dalam waktu singkat berdirilah *Algemeene Studie Club* di Bandung, yang dipimpin oleh Ir. Soekarno. Organisasi semacam ini kemudian tumbuh di beberapa kota besar lain seperti Solo, Yogyakarta, Jakarta, Semarang, dan Bogor. Untuk menjembatani antara pengurus dan anggota, dibentuklah media *studie club* yang diberi nama majalah *Soeloeh Indonesia* (Surabaya), *Indonesia Moeda* (Bandung), *Timboel* (Solo).

Saat itu muncullah pemogokan dan pemberontakan yang didalangi oleh kaum komunis. Pemogokan terjadi di pabrik-pabrik gula, bengkel kereta api, pabrik baja, percetakan Van Dorp, dan di Pabrik Nederlandsch-Indisch Industrie.¹⁰ Dr. Soetomo sebagai tokoh pergerakan diwawancarai dan diminta tanggapannya atas kerusuhan itu oleh wartawan *Bataviaasch Courant*. Dalam wawancara itu dia

¹⁰ Ulasan tentang pemberontakan dan wawancara Dr. Soetomo ini dimuat dalam harian *Bataviasche Courant* 9 Januari 1926. Dalam berita itu disebutkan 17 orang ditahan di Batavia dan 55 orang setelah diperiksa, dibebaskan.

menyatakan menyetujui gerakan itu, namun tidak menyetujui cara-cara yang dilakukan. Interview ini ditentang oleh anggota *Studie Club* dari unsur SI. Dr. Soetomo dituduh telah memberikan keterangan tanpa berkonsultasi terlebih dahulu dengan anggota yang lain. Akibat dari peristiwa tersebut, SI menyatakan diri keluar dari *Indische Studie Club*, karena merasa ditinggalkan oleh Dr. Soetomo.¹¹

Dalam perkembangan selanjutnya, khususnya pada 1926—1927, muncullah kubu yang kooperatif dan non-kooperatif dengan pemerintah kolonial Belanda. Hal ini disebabkan mulai banyaknya kaum muda yang telah menyelesaikan studinya di Belanda, yang mayoritas adalah mantan anggota *Perhimpunan Indonesia*. Mereka bergabung dengan PNI militan yang dipimpin oleh Bung Karno. Sementara itu, kesediaan Dr. Soetomo duduk di *Gemeenteraad Soerabaja* dianggap sebagai pro pemerintah kolonial. Proses pemilihannya dilakukan melalui pemungutan suara. Ia terpilih menjadi anggota *Gemeenteraad Soerabaja* bersama 19 anggota lainnya.¹² Namun, pada 16 Maret 1925, ia secara resmi mengundurkan diri bersama dengan anggota lainnya yang bernama Soenjoto, tatkala Van Gennep terpilih menjadi anggota *Gemeenteraad Soerabaja*.¹³ Kedua tokoh ini tidak bersedia bekerjasama dengan Van Gennep karena ia dikenal sebagai orang yang sangat anti bumi putra.

Setelah keluar dari *Gemeenteraad Soerabaja* ia tetap menghadiri rapat-rapat pergerakan yang diselenggarakan pada malam hari. Pada Juni 1925, ia menyelenggarakan hari *inter-insulair*, yaitu hari

¹¹ Lihat Roeslan Abdulgani (1976) halaman 50.

¹² Dilaporkan oleh Koran *Bataviasch Nieuwsblad* 39 Juli 1924 bahwa berdasarkan suara terbanyak Dr. Soetomo menjadi anggota terpilih bersama anggota lainnya yakni Van Moek, Stemmerix, Askaboel, Dr. Soetomo, Hartman, Nix, Ir. Wermuth dan Nessel van Lisa. Sementara 9 calon lainnya tidak terpilih.

¹³ Selanjutnya lihat berita dari Koran *Het Nieuws van den Daag voor Nederlandsch Indie*, 14 Maret 1925 halaman 1

pertemuan besar pemuda antarsuku dari Jawa, Madura, Bali, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku. Pertemuan *inter-insulair* ini tidak menghasilkan keputusan apa-apa, karena hanya bersifat koordinasi yang digunakan sebagai lobby dan membina hubungan baik dengan kaum intelektual muda se tanah air. Tindak lanjut dari pertemuan ini majalah *Studi Club* Surabaya yang bernama *Soeloeh Indonesia* di bawah pimpinan Dr. Soetomo dan majalah *Studie Club* Bandung yang bernama *Soeloeh Indonesia Moeda* di bawah pimpinan Ir. Soekarno melakukan fusi. Dengan bergabungnya dua majalah ini berarti telah terjadi penggabungan antara kelompok moderat dan kelompok radikal. Langkah ini menggelisahkan pemerintah kolonial Belanda. Beberapa pendekatan dilakukan oleh pemerintah untuk membujuk Dr. Soetomo agar tidak condong ke kelompok radikal Bandung. Namun semua usaha yang dilakukan sia-sia karena ditolak oleh Dr. Soetomo. Prinsip utama yang dia pegang teguh adalah prinsip persatuan antara *Studie Club* Bandung dan Surabaya. Dengan azas persatuan inilah Dr. Soetomo yakin semua perbedaan pendapat dapat diatasi.

Pada Kongresnya di Pekalongan pada 17 Desember 1927, PNI bersama dengan organisasi lain seperti Partai Serikat Islam (PSI), BO, Pasundan, Serikat Soematera, kaum Betawi, Serikat Madoera dan studiklub-studiklub dari berbagai daerah bersepakat bergabung menjadi satu organisasi dengan nama *Permoefakatan Perhimpoean-Perhimpoean Politik Kebangsaan Indonesia* atau disingkat PPPKI. Dengan demikian PPKI merupakan gabungan dari berbagai macam organisasi yang memiliki azas, ideologi, tujuan dan sikap yang berbeda, yang seringkali menimbulkan benih-benih perselisihan di antara anggotanya. PPPKI tidak memiliki kekuatan apa pun untuk mengendalikannya, sehingga banyak anggotanya yang keluar dari organisasi ini.

Indonesisch Studie Club di bawah pimpinan Dr. Soetomo mengalami perkembangan yang cukup pesat. Perkembangan yang cukup kuat ini mendorong pengurus dan anggotanya untuk menjalankan aktivitasnya

di bidang politk. Melalui rapat pleno pengurus dan anggota, pada 16 Oktober 30 *Indonesisch Studie Club* secara resmi berubah namanya menjadi *Persatoean Bangsa Indonesia* (PBI), yang diketuai oleh Dr. Soetomo.

Seperti halnya perkumpulan-perkumpulan lainnya yang diketuai oleh Dr. Soetomo, PBI bersifat terbuka. Bisa menerima anggota dari kelompok apa dan mana saja, tidak memandang ras, suku, agama, golongan atau pendidikannya. PBI mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan meningkatkan derajat rakyatnya berdasarkan kebangsaan Indonesia. PBI memiliki program-program yang konkret seperti memajukan kerajinan, perdagangan, peternakan, pertanian dan koperasi. Hal-hal inilah yang sebenarnya sangat dibutuhkan oleh masyarakat saat itu. Kehadiran koperasi sangat dirasakan kehadirannya oleh masyarakat, karena dengan memanfaatkan koperasi, para nelayan, petani, pengrajin, peternak dapat meningkatkan usahanya. Petani misalnya, sebelumnya mereka harus menggadaikan tanahnya guna memperoleh pinjaman sedikit modal. Dengan hadirnya koperasi ini, maka para petani tidak perlu lagi menggadaikan tanahnya. Mereka tetap dapat memanfaatkan tanahnya untuk diolah, yang memungkinkan para petani tetap dapat bertahan hidup, bahkan sedikit demi sedikit kehidupan mereka menjadi semakin sejahtera.

Dengan bertambah banyaknya anggota PBI, Dr. Soetomo beserta seluruh pengurusnya berniat untuk mengadakan kongres, untuk menyusun kembali arah dan tujuan perkumpulan ini. Kongres PBI akhirnya digelar di Surabaya pada 1935. Dalam kongres ini disampaikan gagasan untuk melakukan fusi antara PBI dan BO. Tujuan dari fusi ini adalah menciptakan suatu organisasi yang lebih solid sehingga diharapkan proses menyejahterakan rakyat ini bias dipercepat, sehingga memberi manfaat yang nyata bagi anggotanya.

Realisasi dari gagasan itu dimanifestasikan dalam Kongres Fusi BO dan PBI yang diselenggarakan di kota Solo pada 24-25 Desember

1935. Berdasarkan keputusan kongres tersebut, salah satu keputusan yang diambil adalah pendirian partai baru sebagai fusi dari PBI dan BO. Parti itu dinamakan *Partai Indonesia Raya* (Parindra), yang bertujuan untuk mewujudkan Indonesia Mulia dan Sempurna.¹⁴ Selain itu, hasil keputusan kongres secara aklamasi menyerahkan kedudukan Ketua Umum kepada Dr. Soetomo, orang yang dianggap paling berjasa, memahami, dan memiliki andil yang besar terhadap pembuntakan partai baru ini.

Sebenarnya, kegiatan yang dilaksanakan oleh partai baru ini merupakan kelanjutan dari rencana kegiatan kedua partai terdahulu, yakni PBI dan BO. Pemerintah kolonial mendukung program-program partai ini karena partai ini bersifat kooperatif, walaupun dikatakan tidak kooperatif murni, namun partai juga akan berani mengambil sikap *incidentele non cooperative* yang artinya akan mengambil sikap non-kooperatif apabila dirasakan perlu, dan tidak segan-segan untuk menarik kembali wakil-wakil dari Parindra yang duduk di dewan perwakilan atau menduduki jabatan penting lainnya.¹⁵

Pada 1936, kegiatan Parindra tetap berjalan, sementara Dr. Soetomo melakukan perjalanan ke India, Mesir, Belanda, Inggris, Jepang dan beberapa negara lainnya selama satu tahun. Sekembalinya dari perjalanannya di luar negeri, Dr. Soetomo kembali lagi ke Surabaya. Pada 15 Mei 1937, Parindra mengadakan Kongres yang I di Jakarta. Hasil kongres Parindra antara lain memutuskan Dr. Soetomo tetap terpilih sebagai Ketua Umum Parindra. Keputusan lain yang tidak kalah pentingnya adalah Parindra harus mensosialisasikan partai ke masyarakat, sehingga diperlukan waktu yang cukup banyak untuk terjun ke wilayah-wilayah lain, guna mensosialisasikan program kerja Parindra.

¹⁴ Lihat Soeroto (1985) halaman 45.

¹⁵ Lihat Redi Panuju (2002) halaman 30

Pada tanggal 1 Maret 1938,¹⁶ Dr. Soetomo menderita sakit keras yang mengharuskannya dia dirawat di rumah sakit Umum Surabaya, tempat dia bekerja sebagai dokter. Saudara-saudaranya yang menjadi dokter, Dr. Soeratmo dari Batavia dan Dr. Soesilo dari Palembang juga sudah datang menjenguknya. Bahkan koleganya yang didatangkan dari Batavia menyatakan tidak mampu mengobati penyakit Dr. Soetomo.¹⁷ Pada 30 Mei 1938, pada pukul 16.20, Dr. Soetomo meninggal dunia.¹⁸

4. DELAPAN GAGASAN DR. SOETOMO

Sebagai seorang priyayi Jawa, Dr. Soetomo memegang teguh *ke-perwira-an* Jawa. Ia tidak pernah bersedia untuk menonjolkan dirinya, sehingga tatkala beberapa orang meminta riwayat hidupnya, agar bisa dijadikan teladan bagi orang lain. Beberapa wartawan telah memintanya. Juga sahabatnya seorang Belanda yang bernama H. Kraemer telah mengirim surat dari Buitenzorg (Bogor) tertanggal 12 Oktober 1933 yang menginginkan agar dia menulis riwayat kehidupannya.¹⁹ Dr. Soetomo menjelaskan dengan rinci mengapa ia berkeberatan menulis riwayat kehidupannya. Namun akhirnya, ia menulis buku yang berjudul *Kenang-Kenangan: Beberapa Poenggoetan Kisah Penghidoepan Orang jang Bersangkoetan dengan Diri Saya*. yang versi lengkapnya dimuat dalam buku *Kenang-Kenangan Dr. Soetomo*

¹⁶ Koran *De Indische courant* terbitan tanggal 5 Maret 1938 mengabarkan bahwa sejak 1 Maret 1938, Dr. Soetomo, Ketua Umum Parindra, dirawat di rumah sakit Pusat. Ia harus beristirahat total dan tidak boleh menerima kunjungan.

¹⁷Koran *Indische Courant* tanggal 19 Mei memberitakan bahwa untuk menangani penyakit Dr. Soetomo, telah didatangkan dokter spesialis dari Batavia. Namun dikatakan bahwa ia tidak mampu melakukan diagnose karena penyakitnya sudah sedemikian parah, sehingga mengancam jiwa pasien itu.

¹⁸Koran *De Indische Courant*, 31 Mei 1938 menurunkan tajuk yang cukup panjang tentang riwayat hidup dan jasa-jasa Dr. Soetomo. Dalam tajuk itu juga disebutkan bahwa ia meninggal dunia pada tanggal 30 Mei 1938 pukul 16.20.

¹⁹Lihat Paul W van der Veur (edit) (1984), halaman 106—107

karya Paul W. van der Veur 9Ed), terbitan Sinar Harapan (1974).

Van der Veur juga menganalisis aktivitas seluruh kegiatan Dr. Soetomo. Ia mengelompokkannya dalam delapan prinsip. Ke delapan prinsip itu, antara lain:

1. Persatuan Indonesia Paling Utama.
2. Perbedaan antara koperasi dan non-koperasi bukanlah merupakan masalah yang penting.
3. Penolakan terhadap ekstrimitas komunis dan ketidaktoleranan Islam.
4. Semua manusia harus terus berusaha dan yakin akan pertolongan Tuhan.
5. Jalan menuju kemerdekaan Indonesia masih sangat panjang dan sukar.
6. Pendidikan Barat telah mengasingkan Bangsa Indonesia dari kebudayaannya sendiri, dan mencetak manusia yang asosial.
7. Kaderisasi harus dimulai dari diri sendiri, dengan disiplin yang tinggi.
8. Kembali ke desa untuk membangun bangsa melalui koperasi.

Ke delapan gagasan Soetomo sebagai hasil analisis dari van der Veur didasarkan pada semua aktivitas Dr. Soetomo sejak mendirikan BO (1908) hingga pendirian Parindra (1937). Demikian banyak perkumpulan yang dia dirikan tidak hanya di Jawa, melainkan juga di Belanda, tempat ia mendalami ilmu penyakit kulit dan kelamin (dermatologi).

Dari kedelapan prinsip yang dipegang oleh Dr. Soetomo, inti dari semua prinsip yang ada, persatuanlah yang mendasari semua aktivitas Dr. Soetomo baik sebagai individu, sebagai dokter, dan sebagai motor dari semua perkumpulan yang didirikannya. Keyakinannya pada

persatuanlah yang akan mampu untuk mengentaskan masyarakat dari kemiskinan. Sejak masih menjadi siswa di STOVIA, Soetomo mendirikan BO berdasarkan semangat persatuan. Walaupun jangkauan BO saat itu masih terbatas untuk wilayah Jawa saja, namun program kerja dari BO, khususnya setelah Kongres Pertamanya pada 1908, membuat perkumpulan ini dicintai oleh masyarakat, karena mengedepankan nilai persatuan.

Setelah ijazah dokter diterima pada 1911, aktivitas Dr. Soetomo banyak difokuskan pada aktivitasnya sebagai seorang dokter. Situasi dan kondisi masyarakat saat itu sangat memerlukan kehadiran dokter untuk menumpas epidemi pes yang sedang mewabah di negeri ini. Oleh karena itu, demi menyejahterakan masyarakat, dia bersedia ditempatkan baik di Jawa maupun di luar Jawa (Sumatera). Pada saat ia melanjutkan studinya di Belanda, ia tetap aktif bergabung dengan pergerakan yang ada di sana, bahkan sempat mendirikan Serikat Dokter Hindia yang belajar di Belanda. Perkumpulan lainnya, seperti *Indonesisch Studie Club*, PPPKI, perubahan organisasi dari *Indonesisch Studie Club* ke PBI juga selalu menonjolkan azas persatuan. Hal ini tampak pula dalam pembentukan *Partai Indonesia Raya* (Parindra) yang juga mengedepankan nilai persatuan ini. Dengan persatuan yang kuat keyakinan Soetomo untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera akan terwujud.

Sikap kooperatif dan non-kooperatif tidak menjadi masalah bagi Dr. Soetomo, karena yang dia inginkan adalah persatuan di kalangan anggota masyarakat. Pada saat didirikannya *Indisch Studie Club* dan PPKI, apalagi pada saat peleburan *Indische Studie Club* menjadi PBI juga mengedepankan aspek persatuan itu. Dari namanya *Persatuan Bangsa Indonesia* persatuan merupakan roh dari organisasi itu, sehingga azas kooperatif dan non-kooperatif tidak akan menjadi masalah, karena dengan semangat persatuan, tujuan utama untuk mensejahterakan rakyat pasti akan tercapai.

Walaupun mendapatkan banyak kritikan dari saingan politiknya, Dr. Soetomo sebagai seorang nasionalis, ia tidak menyetujui komunisme. Pendapat ini disampaikan tatkala ia diwawancarai oleh wartawan *Indische Courant*. Namun ia juga tidak menampik bahwa banyak anggota masyarakat yang tidak puas terhadap kebijakan yang diambil oleh pemerintah kolonial saat itu.

Mensejahterakan rakyat itu merupakan suatu proses. Oleh karena itu setiap usaha harus ditempuh untuk mewujudkannya. Optimisme mewujudkan masyarakat yang sejahtera harus selalu dilakukan dengan meningkatkan profesionalisme setiap warga. Dengan kerja keras, memperoleh bimbingan dari organisasi, dan disertai dengan keyakinan yang tinggi kepada Tuhan, maka cita-cita mensejahterakan masyarakat akan terlaksana.

Jalan menuju kemerdekaan tidak akan mungkin tercapai bila tidak dibarengi dengan semangat persatuan yang tinggi. Tanpa persatuan, kemerdekaan akan sulit diraih. Dengan melihat luasnya wilayah, berbagai jenis suku bangsa, agama, profesi, maka diperlukan konsolidasi demi tercapainya kemerdekaan. Upaya itu tentunya memerlukan waktu yang lama, sehingga mau tidak mau dengan semangat peresatuan, suatu hari kemerdekaan itu pasti tercapai.

Pendidikan Barat dianggap mengesampingkan kebudayaan lokal. Pandangan ini terjadi di kala masyarakat bumi putera masih dianggap sebagai warga negara kelas dua. Sepandai-pandainya bumi putera, dia akan tetap dianggap sebagai warga negara kelas dua, sehingga kondisi itu mempengaruhi kondisi sosial ekonomi, karena bangsa Eropalah (penjajah) yang akan menguasai semua lini, termasuk sektor ekonomi. Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat harus didasarkan atas budaya yang ada saat itu. Seharusnya pendidikan Barat justru akan menyejahterakan rakyat, seperti yang telah diteladani oleh Dr. Soetomo dan dokter lain seperti Dr. Goenawan Mangoenkoesoemo, Dr. Tjipto Mangoenkoesoemo, Dr. Sitanala. Itulah yang dikehendaki oleh Dr.

Soetomo yang telah memperdalam ilmu dermatologi di Belanda dan Jerman.

Bangsa Indonesia hanya akan terbebas dari kemiskinan dan tindasan kaum penjajah apabila memiliki kader yang pandai, memiliki disiplin yang tinggi, dan taat pada tugas dan kewajibannya. Gagasan Soetomo ini tetap relevan pada era kapan pun, mengingat bahwa kualitas manusia sangat mempengaruhi eksistensi bangsa dan negaranya. Oleh karena itu, kualitas anggota masyarakatlah yang menjadi sasaran program-program Dr. Soetomo sejak dari BO hingga Parindra. Perkumpulan ini memajukan anggota masyarakat melalui profesinya masing-masing menuju ke masyarakat yang sejahtera.

Mengingat bahwa mayoritas masyarakat tinggal di pedesaan, dan kondisi di desa sangatlah jauh terbelakang dibandingkan dengan di kota, program-program yang dicanangkan oleh Dr. Soetomo selalu ingin memajukan masyarakat pedesaan. Koperasi, pelatihan keterampilan diarahkan kepada masyarakat di pedesaan, karena mereka tidak pernah tersentuh oleh kebijakan pemerintah kolonial. Peranan para petani, nelayan, peternak, yang memiliki kontribusi yang besar terhadap perekonomian nasional mayoritas tinggal di pedesaan. Oleh karena itu, apabila ingin mensejahterakan bangsa Indonesia, haruslah dimulai dengan menyejahterakan masyarakat di pedesaan.

5. RELEVANSI BO PADA MASA KINI

Masih relevankankah BO pada masa kini? Itulah pertanyaan yang harus dijawab oleh seluruh bangsa Indonesia, khususnya kaum muda. Kini bangsa Indonesia sedang mencari jati dirinya, atau dengan istilah lain, bangsa ini sedang menuju menjadi Indonesia. Kondisi kaum muda yang terpengaruh oleh hingar bingarnya partai politik yang saat ini sedang melakukan konsolidasi dalam memenangkan Pemilihan Umum tahun depan. Mayoritas anggota masyarakat sedang mencari

identitasnya masing-masing guna menonjolkan kelompoknya dengan merendahkan kelompok yang lain.

Selain itu, dari Koran dan majalah ataupun berita di televisi, masalah terorisme belum dapat diberantas oleh aparat penegak hukum. Yang memprihatinkan adalah mayoritas pelaku terorisme atau lebih dikenal dengan istilah “pengantin” adalah kaum muda. Mereka menganggap bahwa diri mereka, melalui aksi-aksi mereka, yang paling benar. Untuk membela kebenaran yang diyakininya, mereka rela berkorban, bahkan dirinya sendiri yang jadi korban demi ideologi mereka. Persatuan menjadi suatu “kata” yang tidak bermakna sama sekali.

Sementara itu, aksi-aksi anarkis yang mayoritas dilakukan oleh kaum muda seakan-akan apa yang mereka lakukan adalah benar. Aksi-aksi mereka dalam melakukan demonstrasi, tawuran antarkelompok atau antarkampung, melakukan *sweeping* terhadap mereka yang dianggap sebagai lawan, sangatlah mengganggu integritas kita sebagai bangsa. Aksi demonstrasi yang selalu berakhir dengan ricuh merupakan tontonan yang setiap hari dapat dinikmati di setiap siaran televisi. Korupsi yang berada di setiap lini stratifikasi masyarakat baik di kalangan pejabat, di kalangan pemangku kepentingan sudah menjadi kebiasaan umum yang sudah dianggap biasa. Mereka melakukan korupsi karena memiliki kepentingan tertentu, dengan cara mengorbankan masyarakat, demi kepentingan keluarganya, partainya, ataupun kelompoknya.

Semua fenomena di atas telah mengabaikan apa yang menjadi prinsip utama dari BO, yakni menomorsatukan persatuan. Persatuan di antara komponen bangsa saat ini sangat lemah. Perkelahian antarwarga atau antarkampung, demonstrasi yang berujung ricuh, bahkan korupsi yang merajalela semuanya jauh dari konsep persatuan, suatu konsep yang dijadikan acuan utama oleh BO. Walaupun organisasi BO sudah tidak dianggap relevan dengan kehidupan organisasi masa kini, namun ruh yang ada dalam BO tetap masih relevan. Bangsa ini telah terpecah-

belah, jauh dari cita-cita Soetomo, karena unsur persatuan sudah tidak lagi dijadikan landasan dasar teknis operasional setiap organisasi masa. Mereka lebih banyak memiliki cita-cita menonjolkan identitas mereka masing-masing demi mencapai tujuan yang mereka cita-citakan. Cita-cita bersama sebagai suatu bangsa dianggap sudah tidak penting lagi.

Dalam menghadapi “musuh” dari luar, maka persatuan seluruh bangsa merupakan senjata ampuh, khususnya dalam menjaga keutuhan NKRI. Tanpa persatuan, keutuhan, kedaulatan negara akan terancam. Dengan semangat persatuan seluruh komponen bangsa, semua hal yang menjadi kendala dalam memperjuangkan kesejahteraan seluruh rakyat akan dapat diatasi dan akan segera menjadi kenyataan.

6. KESIMPULAN

Dari pembahasan di atas, tampak bahwa secara organisatoris, BO sudah dianggap tidak relevan dengan cita-cita kaum muda sekarang. Namun, roh BO yaitu mengedepankan persatuan antarkomponen bangsa, masih sangat relevan dan perlu direvitalisasi lagi. Apa yang sudah dicanangkan pertama kali oleh para pendiri Republik ini, sudah banyak dilupakan orang, khususnya di kalangan kaum muda. Budaya instan dengan menghalalkan segala cara telah merasuk di seluruh lapisan kelompok masyarakat. Untuk merealisasikan semua yang menjadi cita-cita dan tujuan kelompok ini, mereka menggunakan pendekatan individualistik yang mengedepankan kepentingannya sendiri di atas kepentingan orang lain. Tidak segan-segan mereka mementingkan dan mendahulukan kepentingan pribadi atau kelompoknya, bahkan justru merasa bangga apabila dapat mengalahkan kelompok lain. Namun, untuk menuju ke arah kesejahteraan rakyat yang lebih baik, persatuan seluruh komponen bangsa tidak boleh dijadikan prioritas yang paling belakang, karena persatuan menjadi modal dasar pembangunan dan pemberdayaan seluruh komponen masyarakat dalam mewujudkan cita-cita bersama, yakni kesejahteraan yang lebih baik.

Dengan mengedepankan persatuan, maka akan muncul inklusivitas antarkelompok. Masing-masing kelompok akan menghargai kelompok lain, walau sekecil apa pun kelompok itu. Inklusivitas, lawan dari eksklusivitas, menjadikan kelompok-kelompok tersebut mementingkan relasi di antar kelompok itu tanpa ada yang merasa superior atau pun inferior. Persatuan akan mengedepankan persamaan itu. Apabila terjadi perbedaan pendapat atau pandangan, maka unsur yang harus digali bukanlah mengedepankan perbedaan itu, melainkan unsur persamaannya. Dengan demikian, semua kelompok berjalan bersama-sama tanpa ada yang merasa dikesampingkan atau pun dikesampingkan.

Nilai persatuan BO juga menghilangkan azas mayoritas dan minoritas. Semua kelompok akan dianggap sama tinggi atau sama rendah oleh kelompok lain. Perasaan tenggang rasa akan muncul dengan sendirinya apabila azas persatuan diunggulkan. Menganggap remeh atau menganggap kecil kelompok lain merupakan tindakan sewenang-wenang yang dapat melukai kelompok lain. Dengan mengedepankan azas persatuan, tidak terjadi pengambilan keputusan yang merugikan kelompok lain. Kelompok mayoritas akan berusaha untuk melakukan koordinasi dengan kelompok minoritas, bahkan bila perlu melindunginya sebelum keputusan diambil.

Untuk saat ini dan masa mendatang, azas persatuan akan selalu relevan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara. Perubahan apa pun yang ada dalam bidang politik, ekonomi, sosial maupun budaya, akan tetap membawa manfaat yang baik bagi seluruh anggota masyarakat apabila azas persatuan dijadikan pedoman kehidupan. Hal ini sudah masuk dalam salah satu sila dari Pancasila, pedoman hidup seluruh komponen bangsa yang sudah mulai dilupakan orang demi kepentingan pribadi atau kelompoknya.

Dalam proses pembentukan nilai-nilai persatuan ini diperlukan keterbukaan dari masing-masing anggota kelompok masyarakat. Kelompok yang eksklusif dapat menjadi batu sandungan bagi realisasi gagasan persatuan ini. Dengan keterbukaan, kelompok lain akan

mampu mengukur kekuatannya sendiri maupun kekuatan kelompok lain. Dengan demikian, upaya dari dalam akan tumbuh dari setiap kelompok karena masing-masing akan berupaya untuk melengkapi diri agar setara dengan kelompok lain. Hal ini yang selama ini menjadi hambatan proses persatuan seluruh komponen bangsa.

Perbedaan antar masing-masing kelompok mudah “dicairkan” sehingga fanatisme kelompok dapat dihindari. Dengan keterbukaan ini toleransi antarkelompok juga akan muncul, sehingga perasaan paling baik, paling istimewa, paling bagus dibandingkan dengan kelompok lain dapat diterima dengan sepenuh hati, karena hal itu merupakan kritik membangun bagi kelompok lain yang masih belum setara tingkatannya. Apabila terjadi perbedaan, dapat dilakukan negosiasi agar semuanya dapat diterima dengan baik. Carut marutnya kehidupan berbangsa dan bernegara selama ini diakibatkan karena hal-hal tersebut tidak diindahkan. Semangat eksklusivitas, diiringi dengan fanatisme kelompok, berusaha selalu memenangkan diri terhadap kelompok lain yang lebih lemah. Dampak dari kenyataan itu adalah akan memunculkan jarak antar sesama kelompok, yang tentunya sangat jauh dengan azas persatuan tersebut.

Hal yang tidak kalah pentingnya apabila masalah persatuan ini telah dicapai oleh masyarakat kita, yang harus diperkuat adalah *entrepreneurship* yang ada di kalangan seluruh anggota masyarakat. Masyarakat kecil diberikan pelatihan untuk berternak, bertani, berdagang, guna memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat. Dari apa yang sudah dilakukan oleh Dr. Soetomo baik di BO, *Indonesische Studie Club*, PBI, hingga Parindra, pemberdayaan ekonomi masyarakat kecil sangat diperhatikan yang boleh jadi saat ini sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak. Keberpihakan pemerintah terhadap rakyat kecil tidak dirasakan oleh mereka pada era reformasi ini. Pemberian kredit dari bank harus disertai dengan persyaratan yang memiliki kekuatan hukum formal seperti persuratan dan izin yang cukup rumit. Dalam hal penyaluran kredit dan pendirian Bank Nasional Indonesia, yang

diutamakan oleh pendirinya adalah keberpihakan akan pengusaha kecil yang tidak memiliki kekuatan hukum formal tersebut. Sesuatu yang sudah tidak mungkin lagi dilakukan oleh pemerintahan dari Orde Baru sampai dengan Orde Reformasi. Pemerintah mendukung pemberdayaan pengusaha mikro dan pengusaha kecil tetapi tidak memberikan kesempatan kepada mereka, karena mayoritas di antara mereka tidak memiliki hal-hal yang dipersyaratkan dalam pemerolehan kredit bank saat ini. Sungguh suatu kemunduran bila dibandingkan dengan kehidupan ekonomi era awal abad XX.

DAFTAR PUSATAKA

A. Koran

- Bataviaasch Nieuwsblad* terbitan 27 Mei 1913, halaman 1
- Bataviaasch Nieuwsblad*, 7 Agustus 1922, halaman 1
- Bataviasch Nieuwsblad* 39 Juli 1924 halaman 1
- Bataviasche Courant* 9 Januari 1926 halaman 1
- De Indische courant* terbitan tanggal 5 Maret 1938 halaman 1
- De Indische Courant* tanggal 19 Mei halaman 1
- De Indische Courant*, 31 Mei 1938 halaman 1
- De Indisch Courant*, 9 Juli 1923, halaman 1.
- De Soematra Post*, 18 April 1911, halaman 1
- Het Nieuws van den Daag voor Nederlandsch Indie*, 14 Maret 1925 halaman 1

B. Buku

- Abdul Gani, Roeslan (1976). *Alm. Dr. Soetomo yang Saya Kenal*. Jakarta: Yayasan Idayu.
- Hesselink, Liesbeth (2011). *Healers on the Colonial Market*. Lieden: KITLV Press.
- Museum Kebangkitan Nasional (2011). *Soetomo dan Perjuangannya*. Jakarta: Museum Kebangkitan Nasional.
- Panuju, Redi (2002). *Dr. Soetomo Pahlawan Bangsa*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Veur, Paul W. Van der (1984). *Kenang-Kenangan Dokter Soetomo*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

BAB II

BUDI UTOMO: DULU, KINI, DAN ESOK

Reiza D. Dienaputra¹

Berbicara tentang sejarah Indonesia berarti berbicara tentang perjalanan panjang sebuah bangsa besar yang melintas dalam berbagai bingkai besar. Satu di antara bingkai besar yang mewarnai sejarah Indonesia adalah bingkai pergerakan nasional, yang terjadi pada awal abad ke-20. Pergerakan nasional sebagai salah satu episode perjalanan sejarah bangsa Indonesia hadir ke panggung sejarah Indonesia sebagai model baru perjuangan bangsa Indonesia dalam menghadapi belenggu kolonialisme. Nama yang melekat pada bingkai sejarah di awal abad ke-20 bukanlah sekedar nama yang diberikan begitu saja tetapi merupakan nama yang merepresentasikan sebuah jiwa baru atau daya hidup yang menjadi rohnya perjuangan bangsa Indonesia.

Jiwa baru yang melekat pada panggung sejarah Indonesia di awal abad ke-20 di antaranya ditandai oleh hadirnya sebuah organisasi moderen pertama di Indonesia, bernama Budi Utomo (Karim, 1983: 15). Budi Utomo tentunya bukan satu-satunya organisasi yang hadir pada awal abad ke-20. Masih banyak organisasi lainnya yang turut mewarnai bingkai pergerakan nasional di awal abad ke-20, baik yang hadir sebelum Budi Utomo maupun sesudah Budi Utomo. Untuk menyebut beberapa di antaranya, antara lain adalah *Indonesische Vereeniging*, *Indische Partij*, Sarekat Islam, Muhammadiyah, Paguyuban Pasundan, Persatuan Islam, Nahdlatul Ulama, dan Partai Nasional Indonesia.

Kalaulah kemudian hari lahir Budi Utomo ditetapkan sebagai tonggak peringatan Hari Kebangkitan Nasional tidaklah berarti peringatan hari kebangkitan nasional sebagai hanya milik Budi Utomo ataupun tidaklah berarti bahwa setiap peringatan hari kebangkitan

¹ Dosen Sejarah pada Universitas Padjajaran Bandung

nasional didedikasikan semata-mata untuk tujuan tunggal, yakni memperingati hari lahirnya Budi Utomo. Tegasnya, peringatan hari kebangkitan nasional pada esensinya haruslah didedikasikan bagi jiwa-jiwa dan badan-badan bangsa yang telah turut mewarnai bingkai, sekaligus memberikan daya hidup bagi pergerakan nasional. Jiwa-jiwa dan badan-badan bangsa yang berkiprah di berbagai organisasi pergerakan yang hadir di panggung sejarah Indonesia pada awal abad ke-20. Jadi tidak hanya untuk jiwa dan badan Wahidin Soedirohoesodo, tidak hanya untuk jiwa dan badan Soetomo, tidak hanya untuk jiwa dan badan Soewardi Soerjaningrat, tidak hanya untuk jiwa dan badan Tjipto Mangoenkoesumo, tetapi juga untuk jiwa-jiwa dan badan-badan lainnya.



Foto 1. Soetomo, Soewardi Soerjaningrat dan Tjipto Mangoenkoesumo, intelektual muda yang memberikan kontribusi besar dalam organisasi Budi Utomo. (Koleksi Muskitnas)

Tegasnya, peringatan hari kebangkitan nasional juga dipersembahkan bagi jiwa dan badan Tirto Adhi Soerjo, jiwa dan badan Oemar Said Tjokroaminoto, jiwa dan badan Dayat Hidayat, jiwa dan badan Daeng Kanduruan Ardiwinata, jiwa dan badan Soekarno, jiwa dan badan Mohammad Hatta, jiwa dan badan Wage Rudolf Supratman, jiwa dan badan Muhammad Yamin, serta jiwa dan badan lainnya yang telah berkiprah bagi perjuangan pergerakan bangsa Indonesia.



Foto 2. Oemar Said Tjokroaminoto, Soekarnodan Wage Rudolf Supratman, intelektual muda yang memberi daya hidup di masa pergerakan nasional. (Koleksi Muskitnas)

Budi Utomo adalah satu di antara organisasi pergerakan bangsa Indonesia yang hadir pada periode awal pergerakan nasional. Keberadaannya sebagai perhimpunan bumiputera pertama (Muljana, 1968: 114), atau salah satu *avant-garde* pergerakan nasional menjadikan Budi Utomo selalu menarik untuk dijelajahi pada setiap peringatan hari kebangkitan nasional. Penjelajahan terhadap Budi Utomo tentu tidak hanya sekedar bertujuan untuk merekonstruksi ulang kehadiran Budi Utomo dalam panggung sejarah Indonesia tetapi lebih dari itu bagaimana memaknai kehadirannya dalam panggung sejarah Indonesia serta merefleksikannya sesuai dengan kebutuhan zaman dan perkembangan bangsa Indonesia, kini dan nanti.

MENJELAJAHI BUDI UTOMO

Abad XX merupakan era baru perjuangan bangsa Indonesia menghadapi kolonialisme. Setelah sekian lama perjuangan menghadapi kolonialisme didominasi oleh perlawanan bersenjata, sebuah strategi baru digagas sekelompok pemuda, dengan mendirikan organisasi yang

bernama Budi Utomo. Gagasan untuk mendirikan Budi Utomo pada mulanya lahir karena realitas sosial yang dipandang kurang memberi ruang yang “menguntungkan” bagi para pemuda yang termasuk kelompok elite intelektual,² yang terbentuk karena proses edukasi, khususnya mereka yang bersekolah atau menjadi lulusan *School tot Opleiding van Inlandsche Artsen* (STOVIA). Ruang sosial yang hanya memberi tempat nyaman bagi para pangreh praja atau priayi lama yang terbentuk karena kebutuhan administrasi pemerintahan kolonial. Ketidaknyamanan itu lambat laun melahirkan perlawanan sosial dari para pemuda. Tentunya pada awalnya hanya memiliki tujuan untuk bisa mensejajarkan diri dengan para priayi lama atau setidaknya memperoleh penghargaan proporsional sesuai dengan profesi yang dimilikinya.

Gagasan yang semula hanya berkuat diseputar ketidaknyamanan kelompok, kemudian meluas melewati batas-batas kepentingan kelompok manakala realitas sosial memperlihatkan adanya bingkai sosial yang sangat memprihatinkan berkaitan dengan kehidupan rakyat pada umumnya. Pendidikan yang tengah dinikmati para pemuda di STOVIA ternyata hanya menjadi fasilitas yang sangat eksklusif yang tidak mungkin dijamah oleh masyarakat kebanyakan. Kesadaran akan bingkai sosial yang tidak adil tersebut semakin mendorong para pemuda untuk melakukan “sesuatu” yang tidak hanya sekedar menjawab kebutuhan kepentingan kelas mereka tetapi juga lebih dari itu dapat melintasi kebutuhan masyarakat yang lebih luas.

²Kelompok elite intelektual atau generasi baru terdidik ini oleh Sutherland (1983: 115) disebut sebagai priayi baru atau priayi profesional, untuk membedakannya dengan priayi pemerintahan. Di luar itu, Sutherland (1983: 117) mendikotomikan pula priayi dalam priayi tinggi atau ningrat, yakni keluarga-keluarga besar bupati pada bidang kepegawaian tingkat atas, dan priayi rendahan, yakni, orang-orang yang bergelar mas atau tanpa gelar sama sekali, dengan pangkat asisten wedana atau lebih rendah. Tidak jauh berbeda dengan Sutherland, Scherer (1985: 43-63) menyebut kelompok elite intelektual ini sebagai priayi baru atau priayi profesional, sebagai lawan dari priayi birokratis.

Berbagai upaya pun dilakukan para pemuda, yang umumnya masih berusia belia³ untuk menerjemahkan tantangan yang dihadapinya dalam sebuah bingkai yang sesuai dengan ruang sosial mereka. Propaganda-propaganda yang secara intensif dikembangkan Wahidin Soedirohoesodo di berbagai tempat, kesempatan, dan media yang tersedia, khususnya majalah *Retnodhoemilah*, tentang pengumpulan dana pendidikan (*studiefonds*) bagi program perluasan pengajaran atau bagi pemberian beasiswa bagi anak-anak muda pribumi yang pandai, lambat laut terdengar pula oleh para pemuda di STOVIA. Program perluasan pengajaran ini dipropagandakan secara intens kepada para priayi lama, yang secara finansial dipandang paling besar peluangnya untuk bisa mendukung kebutuhan dana yang diperlukan. Para pejabat pribumi pun didatangi. Ada yang memberi respon positif tetapi tidak sedikit pula yang memberi respon negatif karena kekhawatiran terhadap kedudukan mereka. (Nagazumi, 1989: 41-87).

Pada akhirnya semua gagasan Wahidin Soedirohoesodo menjadi sangat jelas saat Wahidin pada akhir tahun 1907 bertemu dengan para pemuda yang tengah belajar di STOVIA, termasuk Soetomo dan Soeradji. Bahkan, Soetomo, yang menyebut Wahidin sebagai dokter tua, sangat terkesan dengan perangai dan pikiran Wahidin yang dipandang membawa gagasan-gagasan baru dan membuka dunia baru yang mampu menerobos jiwa yang tengah terluka dan sakit (Nagazumi, 1989: 53).

Di tengah minimnya dukungan dari para priayi lama, gagasan Wahidin justru memperoleh sambutan hangat dari para pemuda STOVIA.

³Sebagai contoh, beberapa tokoh Budi Utomo berusia antara 19 hingga 22 tahun saat Budi Utomo didirikan. Soewardi Soeryaningrat lahir 2 Mei 1889 dari keluarga aristokratis Yogyakarta terkemuka, Paku Alam; Tjipto Mangoenkoesoemo lahir tahun 1886 dari seorang ayah yang bekerja sebagai guru sekolah dasar pribumi di Ambarawa serta ibu yang merupakan putri pemilik tanah yang kaya di daerah Mayong, sebuah desa dekat Jepara; Soetomo lahir 30 Juli 1888 dari ayah, R. Soewadji, yang sempat mengisi posisi sebagai wedana di daerah Nganjuk (Scherer, 1985: 74, 122, 204-205), sementara Soeradji yang dikatakan Soetomo sebagai pemuda STOVIA yang berjasa memberi nama Budi Utomo, lahir tahun 1888 (Nagazumi, 1989: 53, 57-58).

Bahkan, dalam perkembangannya kemudian, terjadi pengembangan pemikiran atas gagasan Wahidin dari para pemuda STOVIA, yakni tidak sekedar menjawab tantangan tersebut dengan sekedar mengumpulkan dana pendidikan tetapi lebih dari itu, menjawabnya dengan mendirikan sebuah organisasi yang dapat memenuhi kepentingan yang lebih luas. Lebih dari itu, dalam perkembangannya kemudian, lewat Tjipto Mangoenkoesoemo, dalam kongres pertama Budi Utomo, yang berlangsung di Yogyakarta, tercetus pula gagasan untuk menjadikan Budi Utomo tidak sekedar organisasi pendidikan dan kebudayaan tetapi menjadikannya sebuah partai politik. Sebuah gagasan yang tampaknya “terlalu maju” dan “melompat jauh” untuk sebuah kelas yang selama ini sangat patuh dengan aturan dan sistem.

Petarungan antara kelompok intelektual muda atau priayi baru dan priayi lama dan pertarungan di dalam kelas priayi baru menjadikan kelas priayi Jawa menjadi kelas yang sangat dinamis di awal abad ke-20. Perbedaan pendapat yang semula merupakan barang langka kini menjamah para priayi Jawa. Priayi lama yang sebelumnya hidup tenang dengan berbagai gelimang kemudahan dan kemewahan menjadi sangat tidak nyaman dengan gerakan-gerakan priayi baru yang dipandangnya dapat mengancam kedudukan mereka. Mereka pun tampak sangat tidak siap dengan berbagai perdebatan dan pemikiran maju yang mengemuka pada saat itu. Tidak terbayang oleh para priayi lama, para priayi baru yang hanya sekedar tenaga kesehatan dan tidak dianggap penting sebagai kelas sosial baru, tampil ke depan menggugat relung-relung kepentingan priayi lama.

Dinamika antar kelas priayi menjadi semakin lengkap manakala di antara para intelektual muda sendiri terdapat perbedaan pandangan dalam merealisasikan gagasan yang mengemuka. Ada yang berkeinginan untuk merealisasikan gagasannya dengan cara berkompromi dengan kepentingan para priayi lama dan ada pula yang berkeinginan untuk merealisasikan gagasannya dengan tidak berkompromi dengan kepentingan priayi lama tetapi hanya

berkompromi dengan kepentingan rakyat yang lebih luas.

Buah dari berbagai dinamika yang terjadi, pada akhirnya melahirkan sebuah “kemenangan” pada para priayi lama serta sebagian priayi baru yang berkompromi dengan kepentingan para priayi lama, yakni berupa pendirian organisasi yang bernama Budi Utomo oleh Soetomo, bertempat di Jakarta pada hari Minggu, tanggal 20 Mei 1908, pukul sembilan pagi. Saat pendirian Budi Utomo di STOVIA, turut hadir menyaksikan para siswa dari sekolah pertanian dan kehewanan di Bogor, sekolah pamongpraja pribumi di Magelang dan Probolinggo, dan siswa dari sekolah-sekolah pendidikan guru di Bandung, Yogyakarta, dan Probolinggo (Nagazumi, 1989: 62).

“Kemenangan” priayi lama atas priayi baru menjadi semakin sempurna saat berlangsung kongres pertama Budi Utomo di Yogyakarta, 3-5 Oktober 1908. Berbagai gagasan dari priayi baru untuk menjadikan Budi Utomo tidak sekedar organisasi pendidikan dan kebudayaan gagal memperoleh dukungan peserta kongres. Bahkan, yang terpilih sebagai ketua Budi Utomo pun merupakan representasi dari kelompok priayi lama, yakni Bupati Karanganyar (1903-1912) R.A.A. Tirtokoesoemo (Sutherland, 1983:119). Sebagai tujuan organisasi ditetapkan, “Kemajuan yang selaras (harmonis) buat negeri dan bangsa, terutama dengan memajukan pengajaran, pertanian, peternakan dan dagang, teknik dan insdustri, kebudayaan (kesenian dan ilmu)” (Pringgodigdo, 1986: 1).

Kemenangan priayi lama dalam pertarungan menyebabkan kegamangan pada kelompok priayi baru yang masih sulit berkompromi dengan priayi lama. Oleh karenanya, sebagian intelektual muda yang terkalahkan dalam pertarungan, ada yang berupaya tetap bertahan di organisasi dan mempersiapkan sebuah perjuangan baru. Di luar itu, ada pula sebagian intelektual muda yang kemudian memilih tidak berkiprah di Budi Utomo dan berupaya menerjemahkan gagasannya di luar Budi Utomo.

MAKNA KEHADIRAN BUDI UTOMO

Pergerakan dinamis yang terjadi di kalangan priayi Jawa, yang bermuara pada kelahiran Budi Utomo, jelas memberikan pesan penting tentang telah terjadinya perubahan cara berpikir pada bangsa Indonesia dalam menghadapi realitas sosial yang ada. Meskipun penetapan hari lahirnya Budi Utomo sebagai hari kebangkitan nasional banyak yang memandang tidak tepat⁴, namun satu hal yang tak terpungkiri adalah bahwa kehadiran Budi Utomo menandai sebuah perubahan cara berpikir yang menjadikan bangsa yang besar ini memiliki alternatif lain dalam memperjuangkan cita-citanya, lepas dari belenggu kolonialisme. Oleh karenanya, terlepas dari hasil akhir pergumulan yang belum mampu menerjemahkan semua gagasan yang dikembangkan para priayi baru tetapi secara substansial kehadiran Budi Utomo telah memberi inspirasi tentang sebuah model perjuangan baru yang layak dipikirkan dengan cermat oleh semua anak bangsa, yakni perjuangan melalui organisasi.

Diluar itu, kehadiran Budi Utomo juga membawa pesan pergumulan tentang perlunya anak bangsa untuk berpikir secara holistik dan tidak

⁴Beberapa ilmuwan yang menentang penetapan Budi Utomo sebagai awal pergerakan nasional atau kebangkitan nasional, di antaranya adalah Heather Sutherland. Sutherland (1983: 118-119) menyatakan bahwa pemilihan Budi Utomo sebagai pertanda dimulainya gerakan nasionalis di Indonesia adalah kurang sesuai. Hal ini dikarenakan dalam sebagian besar kegiatannya, Budi Utomo bersifat sangat priayi dan menganjurkan program paternalistik yang memberi penekanan bahwa tugas kaum aristokrat adalah untuk membimbing massa ke arah budi pekerti yang tinggi. Dalam pandangan yang berbeda, keberatan atas penetapan hari lahir Budi Utomo sebagai hari kebangkitan nasional juga dikemukakan Mansur Suryanegara. Menurut Suryanegara (2012: 339-347), penetapan hari lahir Budi Utomo sebagai hari Kebangkitan Nasional oleh Kabinet Hatta (1948-1949) merupakan bentuk deislamisasi dalam pemilihan peristiwa sejarah. Setidaknya ada dua hal yang menjadi keberatan Suryanegara atas penetapan tersebut. Pertama, realitas sejarah yang menunjukkan Budi Utomo menolak pelaksanaan cita-cita persatuan Indonesia dalam kongres yang berlangsung di Surakarta (6-9 April 1928). Kedua, sistem keanggotaan yang terbatas pada bangsawan suku Jawa serta gerakannya sebagai gerakan Jawanisme. Oleh karena itu lebih tepat bila lahirnya Budi Utomo ditetapkan sebagai Hari Kebangkitan Kembali Kaum Feodal Jawa.

parsial. Tampilnya para priayi baru menggugat dan melawan realitas sosial yang ada, yang semula hanya berpikir untuk kepentingan kelas mereka tetapi kemudian menyeberang menjadi untuk kepentingan yang lebih luas, memperlihatkan pesan tentang adanya kesadaran untuk menempatkan kepentingan yang lebih luas di atas kepentingan kelompok. Oleh karena itu, para priayi baru dengan gagasan yang diusungnya tidak saja memperlihatkan hadirnya kesadaran baru untuk menempatkan dirinya sebagai akselerator perubahan tetapi juga sekaligus memperlihatkan keberanian mengambil resiko politik, termasuk resiko kehilangan berbagai kenikmatan yang diperoleh sebagai konsekuensi atas gagasan perubahan yang diusung mereka, yang jelas-jelas berbeda dengan kebiasaan-kebiasaan yang telah ada sebelumnya.

Para intelektual muda penggagas dan pemberi daya hidup Budi Utomo pada akhirnya, langsung atau tidak langsung, telah memberi inspirasi pada para priayi lain, baik priayi lama maupun priayi baru, baik yang berada di dalam STOVIA ataupun di luar STOVIA, atau mereka yang secara sosial diuntungkan untuk menjadikan organisasi sebagai media baru perjuangan dalam menghadapi kolonialisme.⁵ Organisasi yang digagaspun tentu tidak harus bersifat politik, tetapi dapat pula tampil dalam bentuk organisasi non politik. Tetapi apapun organisasi yang digagas, semuanya haruslah ditujukan bagi peningkatan kualitas bangsa Indonesia, termasuk didalamnya untuk membebaskan bangsa Indonesia dari belenggu penjajahan.

⁵Daya hidup yang digagas para intelektual muda STOVIA generasi pertama, beberapa waktu kemudian terbukti memberi inspirasi bagi generasi selanjutnya yang bersekolah di STOVIA untuk juga berkiprah membentuk organisasi. Para intelektual muda STOVIA yang berasal dari etnis Sunda, di antaranya Dayat Hidayat dan Junjuran Setiakusuma, bersama Daeng Kanduruan Ardiwinata, beberapa waktu kemudian tampil menjadi tokoh-tokoh yang memberi kontribusi besar bagi pendirian organisasi pergerakan, yang bernama Paguyuban Pasundan, pada tanggal 20 Juli 1913. (Ekadjati, 2004: 36-40). Bahkan, Paguyuban Pasundan menjadi satu di antara sedikit organisasi yang didirikan pada era pergerakan nasional yang masih bertahan hingga sekarang.

BUDI UTOMO DALAM BINGKAI KONTEMPORER

Salah satu pesan penting Budi Utomo bagi Indonesia saat ini adalah tentang kecerdasan anak bangsa dalam membaca situasi zaman bagi kehidupan bangsa Indonesia yang lebih baik. Yang perlu digaris bawahi, pesan anak bangsa tersebut justru lahir dari anak bangsa yang masih berusia belia, antara 19 hingga 22 tahun. Anak bangsa tersebut juga merupakan anak bangsa yang sebenarnya, baik secara politik, ekonomi, dan sosial sudah teruntungkan oleh situasi yang ada. Artinya, tanpa melakukan perubahanpun, kehidupan mereka sudah sangat nyaman untuk ukuran saat itu. Latar belakang keluarga umumnya dari kelas priayi, baik priayi tinggi maupun priayi rendah, sekolah di sekolah pendidikan calon dokter-dokter pribumi (STOVIA), penghasilan sangat memadai, dan stratifikasi sosial berada di atas rata-rata kelas sosial bangsa Indonesia.

Berbagai fasilitas dan kenikmatan yang mereka miliki tidaklah menjadikan mereka multi tuna (tuna hati, tuna rungu, dan tuna netra) terhadap situasi sosial yang ada. Tetapi, justru secara perlahan tapi pasti menjadikan mereka sebagai pribadi-pribadi yang sadar dan memiliki kepekaan sosial yang tinggi. Jadilah, berbagai gagasan bagi perbaikan bangsa hadir dalam pemikiran mereka. Upaya yang kemudian mereka lakukan tidak hanya selesai sampai mendirikan Budi Utomo, tetapi kemudian berupaya menularkan kepekaan sosialnya pada anak-anak bangsa lainnya. Jadilah, mereka sebagai akselerator bagi perubahan yang lebih besar di negeri ini, yakni berupa organisasi-organisasi pergerakan dengan berbagai latar belakang. Sejarah pun kemudian membuktikan bahwa organisasi-organisasi pergerakan menjadi bagian penting yang turut memuluskan kebebasan bangsa Indonesia dari belenggu penjajahan.

Kecerdasan para penggagas dan pemberi daya hidup Budi Utomo dalam membaca situasi zaman dan menerjemahkannya secara tepat dalam berbagai aksi nyata tentunya sangat diperlukan untuk dimiliki oleh anak bangsa pada masa kini dan masa yang akan datang.

Kemampuan anak bangsa untuk berpikir melewati batas zamannya sangat diperlukan untuk Indonesia masa kini dan masa yang akan datang. Betapapun bangsa yang besar ini akan senantiasa dihadapkan pada berbagai tantangan untuk menjadikan bangsa Indonesia lebih baik dari waktu ke waktu. Dinamika internal maupun eksternal akan menjadikan medan tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia bergerak secara dinamis. Dalam setiap dinamika yang bergerak secara dinamis, bisa dipastikan tantangan yang dihadapi akan berbeda-beda. Untuk itu akan senantiasa diperlukan kecerdasan dan kecermatan dalam memberikan jawaban terhadap tantangan yang dihadapi.

Dalam perkembangan paling kontemporer, begitu banyak masalah yang kini tengah dihadapi Indonesia sebagai bangsa yang besar. Demikian banyaknya masalah yang dihadapi sering orang mengatakan bahwa saat ini bangsa Indonesia tengah menghadapi krisis multidimensional. Di antara sekian banyak permasalahan yang dihadapi bangsa yang besar ini, setidaknya ada dua masalah besar yang perlu dicermati dengan baik oleh setiap anak bangsa, yakni masalah penegakan keadilan sosial dan masalah integrasi bangsa.

Disadari atau tidak, tegaknya keadilan sosial akan menjadi pertanda terwujudnya kesejahteraan sosial. Terwujudnya kesejahteraan sosial berarti pula menjadi pertanda terwujudnya stabilitas politik dan ekonomi. Pepatah Timur mengatakan, “tak ada Negara tanpa penguasa, tak ada penguasa tanpa uang, tak ada uang tanpa kesejahteraan, dan tak ada kesejahteraan tanpa keadilan”.

Untuk itu semua, berbagai langkah bagi penegakan keadilan sosial perlu kiranya diperhatikan, baik dalam tataran pemikiran dan terlebih tindakan nyata oleh setiap anak bangsa. Secara umum, langkah penegakan keadilan sosial ini haruslah diarahkan pada upaya pencapaian pemerataan pembangunan di berbagai bidang, dengan memberikan prioritas perhatian pada pemenuhan kebutuhan dasar rakyat Indonesia. Pemerataan pembangunan ini juga harus dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan antara pusat dan

daerah serta antara Jawa dan luar Jawa. Di luar itu, penegakan keadilan sosial juga harus mampu mengikis habis penyimpangan-penyimpangan atas prinsip keadilan di bidang hukum dan politik.

Dalam kaitan itulah, upaya-upaya penegakan keadilan sosial haruslah memiliki satu atau dua dimensi sekaligus, yakni dimensi kerakyatan dan dimensi kebangsaan atau keindonesiaan. Upaya penegakan keadilan sosial berdimensi kerakyatan pada dasarnya harus diarahkan pada upaya pengentasan kemiskinan serta perbaikan peta kesenjangan social ekonomi antara kelompok yang beruntung dengan kelompok yang kurang beruntung atau tidak beruntung. Bila menggunakan teori keadilan yang dikembangkan John Rawls (1971), maka program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan ini haruslah tetap memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu, pertama, member hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan social ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik (*reciprocal benefits*) bagi setiap orang, baik mereka yang berasal dari kelompok beruntung maupun tidak beruntung.

Beberapa kegiatan penegakan keadilan berdimensi kerakyatan harus selalu dan terus menerus mendapat prioritas perhatian, tentunya dengan tidak membawa-bawa warna dan bendera politik ataupun pertimbangan-pertimbangan sempit lain yang akan mengganggu kebersihan upaya penegakan keadilan sosial. Kegiatan-kegiatan tersebut di antaranya adalah penyediaan lapangan pekerjaan, pengaturansistemproduksi yang mampu memenuhi kebutuhanhidup minimum, penyediaan perumahan, penyediaan fasilitas kesehatan dengan kemudahan aksesibilitas, penyediaan fasilitas pendidikan yang berkualitas pada semua jenjang pendidikan yang dapat dijangkau oleh semua lapisan masyarakat, danpengadaansistemjaminansosial (*social security system*) yang dapatmemberikanjaminankesejahteraanbagisetiap

orang, terutamamereka yang kurangberuntung, *from the cradle to the grave*.

Kegiatan-kegiatan keadilan sosial yang berdimensi keindonesiaan tentu tidak kalah mendesak pula untuk terus diberi perhatian. Beberapa di antara kegiatan penegakan keadilan berdimensi keindonesiaan di antaranya adalah pemerataan pembangunan antara pusat dan daerah, Jawa dan luar Jawa, percepatan pembangunan untuk daerah-daerah tertinggal di Jawa maupun luar Jawa, pengembangan dan penguatan harmonisasi dan toleransi hubungan antar suku dan antar umat beragama, serta pembangunan karakter bangsa yang didasarkan atas semangat ke-bhineka tunggal ika-an.

Dalam kaitannya dengan integrasi bangsa, penekanan perlu diberikan pada terbangunnya kembali kesadaran sejarah (*historical conciousness*) tentang jatuh bangunnya perjuangan untuk membangun Indonesia yang satu. Sebuah perjuangan yang penuh dengan darah dan air mata. Sebuah perjuangan yang di antaranya mewariskan pesan bahwa kelemahan terbesar bangsa ini dalam panggung perjuangan melawan kolonialisme tidak lain karena bangsa ini tercerai berai, karena bangsa ini terkotak-kotak atau dikotak-kotakan rezim kolonial, karena bangsa ini tidak mampu menjadikan dirinya bersatu secara kokoh, seperti halnya komunitas lebah, *one for all and all for one*. Jadilah bangsa ini begitu mudah untuk dipecah belah, jadilah bangsa ini begitu mudah untuk diadu domba, jadilah bangsa ini begitu mudah untuk diobrak abrik, jadilah bangsa ini begitu mudah untuk dicabik-cabik, jadilah bangsa ini begitu mudah untuk dikipasi menjadi bangsa yang destruktif, jadilah bangsa ini begitu mudah untuk dikuasai oleh kekuatan asing.

Realitas sejarah yang banyak mengajarkan kelemahan bangsa ini tentu perlu dijadikan kaca benggala untuk menghindarkan bangsa ini kembali ke situasi lama sebelum kemerdekaan berhasil diraih. Untuk itulah berbagai pemikiran yang telah digagas oleh para pendiri bangsa ini, mulai Ikhar Pemuda 1928, Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, hingga

Pembukaan dan Batang Tubuh UUD 1945 yang disahkan tanggal 18 Agustus 1945 perlu diinternalisasikan secara sangat sungguh-sungguh oleh setiap anak bangsa. Disinilah peran segenap anak bangsa, khususnya para priayi abad ke-21 untuk tampil ke depan menjadi pelopor penyadaran bagi penguatan integrasi bangsa. Para priayi abad ke-21 yang berada pada berbagai ranah, baik sosial, politik, maupun ekonomi, baik yang berada dalam suprastruktur politik maupun infrastruktur politik, haruslah selalu menampilkan perilaku-perilaku integratif yang layak diteladani seluruh anak bangsa. Perilaku integratif menjadi semakin penting lagi manakala realitas akan terus memperlihatkan adanya tiga bentuk integrasi politik yang akan terus berproses di Indonesia. Pertama, integrasi politik di antara para elite politik. Kedua, integrasi politik antar elite politik dengan massa. Ketiga, integrasi politik di antara massa (Sjamsuddin, 1989: 172-190).

Berkaitan dengan pentingnya mengedepankan perilaku integratif, secara otomatis pula berbagai perilaku disintegratif perlu dibuang jauh-jauh karena akan sangat membahayakan keberadaan Indonesia sebagai suatu bangsa. Bangsa ini tentu tidak menginginkan Indonesia tinggal nama, seperti halnya Uni Soviet dan Yugoslavia. Bangsa ini juga tentu tidak ingin Indonesia menjadi medan penderitaan rakyat tetapi dan tempat berpesta poranyakekuatan asing, sekaligus laboratorium uji coba mesin-mesin perang asing, seperti Irak dan Suriah. Perilaku-perilaku yang kini menjadi karakter buruk bangsa ini, seperti “lebih senang berdebat daripada berbuat”, “no action, talking only”, “lebih senang mencari kesalahan daripada memperbaiki kesalahan”, “lebih senang menghancurkan daripada membesarkan”, dan “miskin apresiasi tetapi berlimpah kritik” perlu dibuang jauh-jauh. Kini, bangsa ini memerlukan tindakan nyata untuk berbuat yang terbaik bagi negeri ini. Sudah cukup lelah bangsa ini dengan perdebatan yang tiada ujung, sudah lelah bangsa ini dengan konflik demi konflik. Yang diperlukan bangsa ini, kini, adalah kiprah nyata untuk menjadikan bangsa ini lebih

baik. Dan peran priayi abad XXI, termasuk mereka dari kelas konsumen baru⁶, sangat diharapkan. Semoga

⁶Merupakan sebutan untuk kelas menengah yang pertama kali dicetuskan Homi Kharas, ekonom dari Brookings Institution. Kelas ini sering pula disebut sebagai kelas tanpa kehendak revolusi dan menghamba pada rasa aman diri sendiri. Merlyna Lim (Arizona State University) menyebut kelas ini sebagai kelas yang menggunakan media sosial melulu untuk mengeluh tanpa berupaya menyatukan diri untuk sebuah perubahan sosial. Merlyna menyebutnya sebagai click activism, gerakan yang hampir tanpa resiko. Berpijak pada data bank dunia, di Indonesia orang yang termasuk kelas ini berjumlah 130 juta jiwa atau 56,5 persen penduduk Indonesia (memiliki pengeluaran per kapita per harinya US\$ 2-20). AC Nielsen mengemukakan sebanyak 30 juta sementara Asian Development Bank menyebut 81 juta. Dari 56,5 persen tersebut, separuhnya atau sebanyak 50,2% memiliki pengeluaran perkapita perhari US\$ 2-6 serta memiliki penghasilan menganggur US\$ 5-15 ribu per tahun (tahun 2012 berjumlah 36 % menurut riset Euromonitor, lembaga riset asal inggris)(Tempo Edisi 20 – 26 Februari 2012).

DAFTAR SUMBER

- Dienaputra, Reiza D. Strategi Penegakan Keadilan Sosial, *Pikiran Rakyat*, Edisi Selasa, 3 Agustus 2004, Nomor 127 Tahun XXXIX – Tahun Republik LVIII.
- Ekadjati, Edi S. 2004. Kebangkitan Kembali Orang Sunda: Kasus Paguyuban Pasundan 1913-1918. Bandung: Kiblat Buku Utama.
- Karim, Rusli M. 1983. *Perjalanan Partai Politik di Indonesia: Sebuah Potret Pasang Surut*. Jakarta: CV. Rajawali.
- Muljana, Slamet. 1968. Nasionalisme sebagai Modal Perjuangan. Jakarta: Balai Pustaka.
- Nagazumi, Akira. 1989. *Bangkitnya Nasionalisme Indonesia: Budi Utomo 1908-1918*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Pringgodigdo, A.K. 1986. *Sejarah Pergerakan Rakyat Indonesia*. Jakarta: Penerbit Dian Rakyat.
- Scherer, Savitri Prastiti. 1985. *Keselaran dan Kejanggalan: Pemikiran-pemikiran Priayi Nasionalis Jawa Awal Abad XX*. Terjemahan oleh Jiman S. Rumbo. Jakarta: Sinar Harapan.
- Suryanegara, Ahmad Mansur. 2012. *Api Sejarah*. Bandung: Salamadani.
- Sutherland, Heather. 1983. *Terbentuknya Sebuah Elite Birokrasi*. Terjemahan oleh Sunarto. Jakarta: Sinar Harapan.
- Tempo* Edisi 20 – 26 Februari 2012.

BAB III

BUDI UTOMO : MENOLAK “JAMAN EDAN” MEMBANGUN KEBANGSAAN

Suhartono W. Pranoto¹

PENGANTAR

Banyak diantara warga bangsa yang tidak setuju organisasi Budi Utomo (BU) yang lahir pada tanggal 20 Mei 1908 itu dipakai sebagai titik tolak dan kemudian ditetapkan sebagai hari Kebangkitan Nasional. Mereka mengatakan dari segi historis berdasarkan urutan waktu dan lingkupnya saja, yaitu bahwa ada organisasi lain lahir lebih dulu dari pada BU. Selain itu organisasi, yaitu Sarekat Islam (SI) yang skopnya lebih luas secara geografis dan bukan skope Jawa saja seperti yang dipakai pegangan keluasan BU yang Jawa sentris dan lagi secara struktural lebih mengikutkan kelompok priyayi sebagai golongan tengah. Lain halnya dengan SI yang lebih merengkuh *wong cilik* yang hidup dalam penderitaan penjajahan dan selalu dimarjinalkan.

Namun, perlu dilihat lebih jauh mengenai BU itu karena memiliki kompleksitas dampaknya yang sangat luas dibanding dengan organisasi lain, demikian pula dampaknya bagi lahirnya organisasi-organisasi politik dan juga berdampak bagi perkembangan demokrasi dan kebangsaan Indonesia (Abdurachman Surjomihardjo, 1972). BU sendiri terlahir dan didukung oleh para elite baru atau elite moderen Indonesia yang faham tentang buruknya situasi sosio-politik kolonial dan mereka berusaha meresponnya dengan mendirikan organisasi moderen BU. Betapa besarnya cita-cita BU untuk mengembangkan pendidikan anak-anak bumiputra yang tertekan oleh politik penjajahan sehingga ruang gerak sangat terbatas. Oleh karena itu, untuk mendorongnya mereka berusaha mengembangkan pendidikan

¹Dosen Sejarah pada Universitas Gajah Mada, Yogyakarta

itu dengan mengumpulkan dana belajar (*studie fond*). Pikiran yang jernih (*bright thought*) dan kesadaran penuh (*full consciousness*) terhadap nasib bangsa Jawa waktu itu para kawula muda yang tergabung dalam siswa STOVIA (*School tot Opleiding van Inlandsche Artsen*) menyingsingkan lengan baju untuk mendirikan organisasi BU sebagai wadahnya (Akira Nagazumi, 1989).

Organisasi BU berkembang cepat dan diterima masyarakat sebagai pembuka zaman baru. Mula-mula memang hanya diapresiasi golongan priyayi, tetapi kemudian meluas ke bawah, ke *kawula alit* sejalan dengan perkembangan sekolah yang dikembangkan pemerintah kolonial. Demikian pula lingkup geografis bukan hanya memberikan inspirasi berdirinya organisasi lokal, tetapi menjalar ke organisasi *cross border* alias lintas batas kedaerahan dan bahkan menuju ke Indonesiaan. Defeodalisasi berjalan dari sedikit, yang semula berorientasi pada priyayi kemudian bergeser ke golongan bawah.

Sejalan dengan perkembangan BU dan lagi kehidupan organisasi ini yang dapat difahami bukan semata-mata sebagai organisasi lokal yang Jawa sentris dan lagi hanya berskope priyayi, tetapi organisasi ini jelas sebagai pengusung jiwa kemajuan (*progressief*) lewat pendidikan. Secara sosiologis dikatakan bahwa “Pendidikan adalah dinamit yang dapat menghancurkan sistem kolonial yang sangat rigid”. Berbasis pendidikan inilah yang diyakini para pendiri BU mampu mengembangkan nilai kebangsaan yang sangat diperlukan bagi perjuangan menuju kebebasan dari penjajahan. Bukankah hal ini diyakini dan disadari oleh mereka yang jelas mempunyai nilai futuristik, bahwa ke depan BU sudah memprediksi hanya dengan pengembangan pendidikanlah bangsa Indonesia dapat merengkuh kemerdekaan.

Dari perkembangan latar belakang masyarakat dan nurani serta kejiwaan para *founding fathers* BU, kalau memang BU mempunyai nilai kejuangan yang tinggi perlu dipertanyakan. Pertama, benarkah BU sangat kontekstual dan menggenggam harapan bagi kemerdekaan Indonesia lewat pengembangan pendidikan. Kedua, apakah BU

berkarakter kuat dan mempunyai nilai perilaku mulia yang berlaku sepanjang zaman. Dan, ketiga apakah etos BU masih bisa berkorelasi dengan kondisi kebangsaan sekarang dan masa depan?

Pertanyaan-pertanyaan ini dimaksudkan untuk membingkai penjelasan sekitar peran BU dengan kondisi kebangsaan mutakhir yang dihadapi bangsa dan khususnya berkaitan dengan karakter bangsa yang tengah redup. Bisakah keredupan karakter dan kebangsaan ini direvitalisasi lewat etos BU meski harus dijawab secara hati-hati tetapi dapat diasumsikan bahwa jiwa dan semangat BU dapat menyumbang pulihnya keredupan yang tengah dialami bangsa Indonesia.

BUMIPUTRA VS KOLONIAL

Untuk memahami sejarah berdirinya BU diperlukan gambaran situasi dan kondisi yang melatarbelakangi yang serba kompleks yang mendukung genesis organisasi pergerakan itu. Tidak terlalu jauh ke belakang dalam sejarah Indonesia, Jawa khususnya, perlu diperhatikan perkembangan politik kolonial Belanda beserta peralihannya dari politik kolonial konservatif, liberal, dan etis. Dampak dari tiga jenis politik kolonial itu tidak menguntungkan bagi kehidupan sosio-politik masyarakat Indonesia, yang dalam berbagai hal masyarakat Jawa khususnya dalam kondisi terbelakang (*backward*) yang diliputi suasana kebodohan, kemiskinan, kebutaaksaraan dan sejenisnya.

Suasana sosio-politik itu lebih banyak dirasakan dan direspon oleh para elite. Diantara mereka pertama-tama adalah elite istana yang diwakili oleh para *literati* atau pujangga istana yang mampu menyalurkan ide atau gagasan untuk keluar dari kondisi dan situasi yang menelakung itu. Meski mereka ada dalam lingkup feodal dan primordial tetapi sang pujangga mampu mengungkapkan keinginan hati nurani untuk keluar dari cengkeraman politik kolonial dan mencari jalan dan cara baru. Mereka melakukan refleksi kultural dengan karya sastranya menyampaikan kepincangan masyarakat bumiputra.

Bagaimana refleksi kultural berlangsung yang diungkapkan oleh pujangga Ranggawarsita (1802-1873) dari keraton Surakarta, pemerintahan PB IX (1862-1893), yang tertulis dalam serat *Kalatidha* (Zaman Galau). Sang Pujangga hidup dan mengalami situasi abad ke-19 dan dari keprihatinannya itu sang pujangga membuat ekstraksi zaman yang disebut "*jaman édan*". Jelas bahwa situasi akhir abad ke-19 dan awal ke-20 dipenuhi situasi Zaman Edan, tertulis dalam bait 7 serat *Kalatidha* dalam *Têmbang Sinom*:

"Amênangi jaman édan,
éwuh aya ing pambudi,
mèlu édan ora tahan,
yèn tan mèlu anglakoni,
boya kaduman mélik,
kalirên wêkasanipun,
dilalah kêrsaning Allah,
bêgja bêgjané kang lali,
luwih bêgja kang éling lan waspada".

Terjemahan dalam bahasa Indonesia:

"Mengalami zaman gila,
serba sulit dalam pemikiran,
ikut menggila tak tahan,
kalau tidak ikut (menggila),
tidak (akan) mendapat bagian,
akhirnya kelaparan,
takdir kehendak Allah,
sebahagia-bahagiaanya yang lupa,
lebih bahagia yang sadar dan waspada"

Perlu diketahui bahwa ekstraksi refleksi zaman bukan hanya tertulis dalam serat *Kalatidha*, tetapi juga tertera dalam serat *Sabdajati*, *Sabdatama*, dan *Sabda Pranawa* (Karkono Partokusumo, 1983). *Jaman édan* itu sendiri merupakan bagian dari zaman yang besar yang disebut *Kalabendu*, yaitu suatu zaman yang dalam kondisi rusak. Tanda kerusakan antara lain makin meningkatnya ketamakan, rendahnya kepatuhan pada undang-undang, banyaknya pelanggaran karena ikut-ikutan, dan itu semua perbuatan buruk. Oleh karena itu, orang diingatkan agar membuang sifat tamak dan membuang perbuatan menyimpang.

Refleksi politik kolonial sebagaimana dalam sejarah tertulis bahwa pemerintah kolonial mempraktekkan diskriminasi sosio-politik antara penjajah dan terjajah, dominasi dalam pemerintahan kolonial terhadap pemerintahan dan masyarakat bumiputra, memaksakan hegemoni kultural-psikologis agar masyarakat terjajah dalam kondisi inferior alias rendah diri, sebaliknya posisi masyarakat kolonial yang dominan menjadi berperasaan superior, bangga, congkak, arogan, semena-mena, dsb. Dengan demikian maka terjadi gap sosio-kultural yang dipelihara agar bumiputra tidak dapat melakukan mobilitas sosial vertikal. Di sisi lain, dampak yang lebih jauh adalah termarginalkannya dan terstigmatisasinya masyarakat bumiputra.

Dari refleksi historiografi tradisional dan kolonial eksplanasi sejarah menjadi lebih gamblang bahwa masyarakat waktu itu dalam keadaan sakit dan perlu terobosan diagnosa dan pengobatannya yang khas. Para mahasiswa STOVIA inilah, Sutomo dan kawan-kawannya lah menindaklanjuti pemrakarsanya, Dr. Wahidin. Para elite itu secara kolektif keluar dari kungkungan kolonial yang menyesak nafas dengan mendirikan organisasi BU.

Dari dua sumber ini, pendukung kulturenya masing-masing berhadapan, yaitu elite bumiputra dengan pemerintah kolonial. Terobosan yang dilakukan elite bumiputra ialah dengan melakukan *cultural balance* yang seterusnya direalisasikan lewat pendidikan

bumiputra akan menghasilkan emansipasi, atau persamaan derajat sehingga elite pribumi dapat melakukan *political bargaining*. Keadaan seimbang ini jelas membuat pemerintah kolonial melakukan penghitungan ulang tentang politik kolonialnya.

MERESPON KRISIS ZAMAN

Para elite baru sebagai *homo novi* yang mempunyai pengalaman pribadi, memahami situasi kolonial dan memiliki pengetahuan yang diserap dari karya sastra khususnya karya Ranggawarsita membekali mereka untuk membangun kesadaran identitas, membentuk solidaritas, dan kemudian mengelola integrasi dan mobilitas (Sartono Kartodirdjo, 1994, 4-5). Situasi kolonial akhir abad ke-19 dan awal 20 syarat dengan luapan emosional untuk menandinginya (*counter culture*) dengan membangun identitas kejawaan yang etnosentrik itu harus ditonjolkan bahwa para elite Jawa itu sudah eksis. Meski mereka berpendidikan Barat tetapi melakukan resistensi dengan membentuk organisasi moderen yang menghasilkan *political balance*, yang untuk sementara dilakukan lewat *cultural balance* lebih dulu. Dari sini dimungkinkan dialog politik dengan pemerintah kolonial dapat dilakukan karena dalam posisi setingkat, di samping komunikasi politik dengan anggota BU makin lancar. BU menjadi organisasi moderen yang mengelola solidaritas (*solidarity maker*) yang sangat diperlukan dalam menghadapi pemerintah kolonial.

Kondisi yang stigmatik yang merendahkan bumiputra dengan istilah *inlander* dengan berbagai predikat yang menyakitkan hati sudah sepatutnya didepak keluar dari ruang kolonial. Cara yang sangat didambakan adalah dengan membentuk organisasi BU yang mempunyai kandungan karakter kejawaan untuk memerangi ketamakan dan kedhaliman. Antistigmatisasi etnik diperlukan atau perlu diangkat oleh manusia Jawa yang mempunyai *budhi utami*. Gagasan Mas Wahidin ditawarkan kepada murid-murid STOVIA dan langsung mendapat

sambutan dari mereka antara lain Sutomo dan Suradji. Imam Supardi menulis biografi Dr. Sutomo yang kemudian dikutip Akira Nagazumi. Pada 1907 Wahidin keliling Jawa untuk kampanye mendirikan BU. Dia mengunjungi Batavia dan mahasiswa STOVIA. Wahidin berpamitan pada dua orang siswa, setelah mengunjungi mereka dan terus akan ke Banten untuk “kampanye” BU. Sutomo memuji tekat dokter tua dengan mengatakan: “*Punika satunggaling padamêlan saé sarta nélakaken budi utami*” (Ini merupakan perbuatan baik serta mencerminkan keluhuran budi) (Akira Nagazumi, 1989: 68).

Secara etimologis budi berasal dari *bodhi* atau *buddhi* (Sanskerta) artinya keterbukaan jiwa, pikiran, dan kesadaran, akal, dan daya untuk membentuk sesuatu. *Utomo* dari *uttama* (Sanskerta) artinya tingkat pertama, sangat baik, juga berarti kebajikan dan kesempurnaan. Dianalogkan dengan seorang hakim yang kelewat pandai tetapi tidak berbudi, jadi tidak mempunyai arti apa-apa. Demikian pengertian budi dan contoh seorang hakim itu sudah dimuat dalam surat kabar *Darmo Kondo* pada 21 April 1904 dengan judul “Hal Budi Manusia”. Diperkirakan artikel ini mengilhami para pendiri dan pendukung BU. Jadi, sangat jelas bahwa organisasi BU bersifat kejawaan dan berbekal etos Jawa dengan mengutamakan *budi luhur* yang akan mengatasi perilaku buruk dan jahat. Hanya orang yang jujur dan berperilaku baik dan utama saja yang mampu melawan kejahatan dan kemunafikan. Etos sebagai spesifikasi pikiran dan perilaku orang Jawa akan dijadikan karakter organisasi BU khususnya, yang berisi ajaran moral dan etika sebagaimana yang diilhami dari karya sastra abad ke-19.

MEMBANGUN KEBANGSAAN

Pertanyaan yang selalu mengganggu adalah apakah BU itu tetap merupakan organisasi lokal yang etnosentrik ataukah terjadi transformasi dari etnosentrik ke nasiosentrik. Elaborasi yang mendalam sangat diperlukan guna melihat evolusi orientasi ideologis

dan terjadinya perubahan dari lokosentrik ke nasiosentrik dalam arti keluar dari etnonasionalisme dan berubah mengarah ke nasionalisme atau kebangsaan.

Transformasi itu begitu cepat karena Kongres BU di Yogyakarta tanggal 3-5 Oktober 1908 terdapat evidensi adanya perubahan ke arah kepentingan bangsa Indonesia dan bukan suku bangsa Jawa lagi. Sementara itu terjadi perdebatan antara kaum tua dan muda. Kelompok muda menginginkan perjuangan yang lebih agresif dengan model Barat, bukan sekedar *cultural struggle* tetapi harus mengubah orientasi dari *cultural* ke *political struggle*. Perjuangan politik menurut mereka akan lebih akurat dan mengena bagi kepentingan bangsa (Akira Nagazumi, 1989).

BU seolah menjadi *sparing partner* pemerintah kolonial karena pada tingkat awal pergerakan nasional hanya organisasi itu yang dapat diajak berembuk tentang perkembangan politik di Indonesia. Lagi pula sikap moderat BU memberi angin lunak bagi perkembangan organisasi politik waktu itu. Ketika ketakutan pemerintah kolonial akan merembetnya Perang Dunia I (1914-1918) ke koloni maka dengan segera pemerintah mengajak BU ikut dalam *militie boemipoetra* guna mempertahankan koloni dari serangan musuh. Jadi, betapa kuatnya peran BU waktu itu karena mempunyai daya tawar. Menghadapi pendirian BU ini, pemerintah harus menimbang dan sangat hati-hati.

Demikian pula ketika terjadi perkembangan politik kolonial yang makin santer dengan rencana mendirikan *Volksraad*, maka BU-lah yang diajak berembuk. Akhirnya menjadi kenyataan bahwa tahun 1918 Dewan Rakyat itu berdiri meski kenyataannya dewan itu isinya wakil-wakil pendukung kebijakan kolonial. Masih lagi dapat disorot berubahnya orientasi pada 1930 dengan berdirinya PBI (Persatuan Bangsa Indonesia Raya) yang masih dimotori tokoh lama Dr. Sutomo.

Partai itu dan tokoh Sutomo masih tetap kuat dengan cita-cita kebangsaan yang diperjuangkan lewat kemajuan ekonomi sosial

masyarakat dan kesejahteraan rakyat yang disebutnya *volksbestaan* sejak lebih dari dua desenia. Koperasi untuk petani dan nelayan dikembangkan sehingga Parindra mendapat dukungan masyarakat dan beranggotakan golongan bawah. Pada desenia ketiga, depresi dunia berlangsung juga berpengaruh pada pergerakan nasional. Parindra yang berfusi dengan BU didirikan 1935 terus mengisi aktivitas politik guna memperjuangkan kepentingan bangsa. Demikian pula dalam menghadapi kekuatan baru berupa gerakan ke selatan (*nan yo*) oleh Jepang yang memasuki Perang Dunia II, Parindra bergabung dengan partai politik lain dalam GAPI (Gabungan Politik Indonesia) pada 1939. *United action* dalam arti aksi terpadu untuk kepentingan bangsa selalu digali dan dilakukan demi kepentingan bangsa Indonesia.

BU berumur panjang dan dalam orientasinya tetap konsekuen terhadap kepentingan bangsa. Transformasi orientasi dari lokal ke nasional adalah suatu hal yang wajar dalam merespon tekanan kolonial dan berkembangnya orientasi ke arah kemerdekaan. Meski BU dalam perjalanannya sangat kooperatif terhadap pemerintah tetapi organisasi ini sangat komit terhadap kepentingan nasional. Perjalanan politik inilah menandai BU sangat peduli pada nasionalisme (Abdurrahman Surjomohardjo, 1972).

FUTURISTIK

Bagaimana dengan peran BU dalam kekinian dan masa depan bangsa Indonesia dengan mengaitkan pertanyaan apakah etos dan karakter BU dapat dipakai sebagai modal menegakkan redupnya kebangsaan sekarang dan juga kemungkinan di masa depan. Dengan bekal pengalaman BU masa lalu yang selalu merespon krisis zaman dan mengisi kegalauan masyarakat diperkirakan jiwa dan semangat BU masih relevan dan tetap bisa disumbangkan.

Sejarah akan mengemukakan salah satu hukumnya bahwa terjadi *history repeats* alias sejarah berulang dalam arti berulang dalam pola

serupa dan berulang dalam waktu yang berbeda. Salah satu modal utama, kalau dulu lahirnya elite moderen sebagai produk politik kolonial maka pada paska kemerdekaan ini sudah berkembang pesat pendidikan yang melahirkan elite-elite baru yang secara kualitatif dan kuantitatif sangat mampu menyelesaikan persoalan kebangsaan.

Generasi baru adalah generasi terdidik yang jauh lebih banyak lulusan Perguruan Tinggi yang jika dibandingkan dengan situasi seabad lalu sangat berbeda. Indonesia dengan generasi mudanya sangat cerdas dalam bidang politik, birokrasi, teknik, hukum, sosial, budaya, dll. Jelas bahwa kalau dulu ditekankan pada pendidikan bangsa, sebenarnya BU mempunyai karakter atau kepribadian yang sangat futuristik (*futuristic ideas*) dan berlaku sepanjang zaman. Artinya bahwa pendidikan bangsa adalah kunci kemajuan dan kesejahteraan.

Rekrutmen manusia baru berubah dari *local elite* menjadi *national elite* yang pasti mempunyai *national power* dalam membangun bangsa dan negara menjadi lebih kuat. Hanya persoalannya adalah manajemen bangsa yang baik dan tegas serta disiplin yang akan menghasilkan bangsa yang kuat dilandasi karakter yang kuat pula. Di sini diperlukan *grand design* dalam mengatur bangsa dan dijalankan lewat *leadership* yang kuat, disiplin, dan tegas pula. Lahirnya elite Indonesia sekarang adalah berkat terilhaminya kepentingan bangsa yang dimunculkan sejak lahirnya BU, yaitu betapa pentingnya peran elite sebagai penerus bangsa (Suhartono W. Pranoto, 2012).

Peran BU sangat luar biasa karena *power, spirit, and its impacts* sehingga BU dapat dipakai sebagai acuan ke masa depan. Pesan moral dan makna historis yang dipantulkan dari dalam BU yang memiliki *innerlijke waarde* sangat diperlukan bagi kelangsungan memupuk kebangsaan (Taufik Abdullah, 2001). Singkatnya, BU sebagai institusi yang dibangun elite pada zamannya memiliki *predictive capacity* yang luar biasa kekuatannya untuk membangun karakter bangsa.

CATATAN KESIMPULAN

Sebagai catatan akhir dari uraian singkat di atas dapat diambil beberapa kesimpulan yang sangat menggelitik untuk kepentingan bangsa Indonesia di masa sekarang dan masa depan. Intisari seluruh perjuangan BU adalah demi kemajuan dan kemaslahatan bangsa Indonesia. Beberapa butir yang dapat dipakai sebagai pegangan adalah.

1. Membuka stagnasi dan kebekuan. Cara yang dilakukan BU dalam menghadapi kebekuan diskriminasi sosio-politik dengan berkreasi lewat pendidikan yang akan menghasilkan elite baru pendukung ideologi kebangsaan.
2. BU berkarakter kuat dan sangat konsisten dalam perjuangannya. Lewat pikiran dan perilaku yang terpuji (*budi utomo*) mampu melewati masa-masa krisis kebangsaan. Stagnasi dan kebekuan kebangsaan dapat dicairkan lewat revitalisasi karakter bangsa yang berkuat pada tereduksinya *moral and attitude*.
3. Karakter yang tangguh berlandaskan edukasi. Karakter hanya dapat dibangun lewat pendidikan yang bersinergi. Pendidikan keluarga adalah pendidikan awal membangun karakter bangsa yang dilanjutkan pendidikan formal di sekolah dan di masyarakat.
4. *Leadership* yang peduli bangsa. Kepemimpinan yang mencakup *nation wide* sangat diperlukan, sebab terdapat kecenderungan bahwa kebangsaan mulai terkoyak setelah terjadinya pengkotakan kepemimpinan dan kekhususan pengelolaan, misalnya hanya untuk golongannya, partai dan juga keluarganya. Jadi, harus ditegaskan bahwa komitmen kebangsaan tidak dapat ditawar-tawar lagi.
5. Merespon krisis zaman, menetas kebangsaan dan membangun harmoni. Setiap zaman menghadapi tantangan

yang berbeda. Kalau terjadi krisis karakter sudah semestinya direvitalisasi karakter bangsa yang ada dalam butir-butir Pancasila. Untuk itulah diperlukan jawaban yang cerdas untuk menjawab krisis zaman dengan mengunggulkan kepentingan bersama dalam arti seluruh bangsa agar terjadi harmoni dan sejahtera.

BIBLIOGRAFI

Abdurachman Surjomihardjo. *Pembangunan Bangsa dan Masalah Historiografi*. Jakarta: Idayu, 1972.

Abeyasekere, Susan. "One Hand Clapping: Indonesian Nationalists and the Dutch, 1939-1942". *Monash Paper*, No.5, 1972.

Blumberger, J.Th.P. *De Nationalistische Beweging in Nederlandsch-Indië*. Haarlem, 1931.

Imam Supardi. *Dr. Sutomo*. Jakarta: Jambatan, 1951.

Ingleson, John. Terj. *Jalan ke Pengasingan. Pergerakan Nasionalis Indonesia, 1927-1934*. Jakarta: L3PS, 1988.

Ki Hajar Dewantara. *Dari Kebangunan Nasional sampai Proklamasi Kemerdekaan. Kenang-kenangan*. Jakarta: Endang, 1952.

Karkono Partokusumo, H. *Zaman Edan. Pembahasan Serat Kalatidha Ranggawarsitan*. Yogyakarta: Javanologi, 1983.

Koch, D.M.G. Terj. *Menuju Kemerdekaan*. Terj. Jakarta: Pembangunan, 1951.

Nagazumi, Akira. Terj. *Bangkitnya Nasionalisme Indonesia. Budi Utomo 1908-1918*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1989.

Pluvier, J.M. *Overzicht van de Ontwikkeling der Nationalistische Beweging in Nederlandsch-Indië, in de jaren 1930-1942*. Bandung: Sumur Bandung, 1952.

Ricklefs, M.C. *A History of Modern Indonesia since c. 1200*. London: Palgrave, 2001.

Sartono Kartodirdjo. *Sejak Indische sampai Indonesia*. Yogyakarta: Kompas, 2005.

----- . *Pembangunan Bangsa: Nasionalisme, Kesadaran dan Kebudayaan Nasional*. Yogyakarta: Aditya media, 1994.

Scherer, Savitri-Prastiti. Terj. *Keselaranan dan Kejanggalan. Pemikiran-pemikiran Priyayi Nasionalis Jawa Awal abad XX*. Jakarta: Sinar Harapan, 1985.

Suhartono, W. Pranoto. *Sejarah Pergerakan Nasional, dari BU sampai Proklamasi, 1908-1945*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995.

----- . *Wong Cilik Belum Merdeka? Persepsi Sosial dan*

Politik Anak Bangsa, 1945-2010. Surakarta: Yuma Pustaka, 2012.

Taufik Abdullah. *Nasionalisme dan Sejarah*. Bandung: Satya Historika, 2001.

BAB IV

KEBANGKITAN NASIONAL MENUJU INDONESIA BARU: BELAJAR DARI BUDI UTOMO

Warto¹

Peringatan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) yang diadakan setiap tanggal 20 Mei telah menjadi acara rutin bagi bangsa Indonesia. Tema peringatan Harkitnas ke-105 tahun ini adalah “Dengan Semangat Kebangkitan Nasional, Kita Wujudkan Demokrasi Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Menuju Indonesia Yang Maju dan Modern Dalam Bingkai NKRI”. Slogannya Indonesia Jaya, Indonesia Maju dan Modern. Tema tersebut memberi pesan bahwa perjuangan bangsa Indonesia masih terus berlangsung. Melalui upacara peringatan Harkitnas, bangsa Indonesia diajak berkomitmen meneruskan perjuangan para Bapak pendiri bangsa untuk mewujudkan Indonesia yang maju, modern, dan sejahtera. Harkitnas kita jadikan referensi dan sumber inspirasi dalam memperkuat kembali nilai-nilai kebersamaan sebagai bangsa dalam menghadapi berbagai persoalan yang muncul di era global ini.

Indonesia sebagai Negara bangsa masih terus berproses menuju kedewasaannya. Lahirnya Negara kesatuan RI pada tahun 1945 merupakan puncak perjuangan rakyat Indonesia melawan penindasan dan sekaligus menjadi titik awal perjalanan panjang bangsa Indonesia menuju masyarakat yang bermartabat, demokratis, dan berkeadilan. Proklamasi kemerdekaan 1945, yang oleh Bung Karno disebut ‘jembatan emas’, bukanlah tujuan akhir proses sejarah Indonesia yang bergerak secara dialektik, melainkan sebagai instrument dalam meraih cita-cita bersama sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat. Dalam mewujudkan cita-cita luhur itu, kita selalu diingatkan agar kita

¹ Dosen Jurusan Ilmu Sejarah FSSR UNS, Jl. Ir. Sutami 36A Surakarta 57126. Dapat dihubungi melalui e-mail: warto_file@yahoo.com; HP 10122630610

tidak melupakan sejarah. Beberapa peristiwa sejarah yang kita jadikan tonggak-tonggak penting perjalanan sejarah bangsa Indonesia, telah menjadi memori kolektif dan diperingati sebagai hari besar nasional. Kebesaran arti peristiwa itu bukan terletak pada lingkup kejadiannya, tetapi pada makna yang kita lekatkan pada peristiwa itu. Salah satu tonggak penting dari sejarah perjuangan bangsa, yang diperingati setiap tahun sebagai hari besar nasional, adalah hari lahirnya organisasi Budi Utama (BU) pada 20 Mei 1908. Sejarah Budi Utama telah menjadi fakta keras dan menjadi bagian dari memori kolektif bangsa sehingga diterima kebenarannya (*accepted history*). Terlepas dari masih adanya pandangan pro-kontra terhadap penetapan hari lahirnya BU sebagai Hari Kebangkitan Nasional (Asvi Warman Adam, 2007: 21-23; Ahmad Mansyur Suryanegara, 2009: 337), BU telah menjelma menjadi simbol perjuangan bangsa dan sekaligus sumber inspirasi yang penting bagi bangsa Indonesia dalam menapaki sejarahnya. Perlu ditambahkan, sejarah peringatan Harkitnas sendiri pertama kali diadakan setelah kemerdekaan yaitu pada masa pemerintahan Kabinet Hatta (1948-1949) untuk menghindari perpecahan bangsa yang sedang menghadapi perang kemerdekaan. Untuk memperkuat kembali rasa persatuan ditetapkanlah hari kelahiran BU tanggal 20 Mei sebagai Hari Kebangkitan Nasional.

Hingga saat ini, bangsa Indonesia masih dihadapkan pada berbagai persoalan yang demikian kompleks, seperti menguatnya sentimen primordial, kemiskinan, pengangguran, terorisme, konflik horizontal akibat perbedaan SARA, korupsi-kolusi-nepotisme (KKN), dan sebagainya. Revolusi kemerdekaan tahun 1945 sebagai antitesis kolonialisme dan imperialism belum sepenuhnya mampu mengubah tatanan lama yang diskriminatif, eksklusif, dan feodalistik. Proses menjadi Indonesia masih membutuhkan waktu lama yang secara dialektis melibatkan berbagai aktor dengan kepentingannya masing-masing. Di satu sisi, kita masih menyaksikan adanya kelompok *established* yang menolak perubahan karena dianggap mengancam kepentingannya, dan di sisi lain muncul generasi baru yang progresif

yang menginginkan pembaruan sosial menuju masyarakat yang modern, demokratis, dan terbuka. Kekuatan berbagai kelompok kepentingan ini, dengan latar belakang dan orientasi ideologis yang berbeda-beda, saling berkompetisi memperjuangkan kepentingannya masing-masing, yang tidak jarang keluar dari kerangka dasar cita-cita proklamasi kemerdekaan.

Selama masa reformasi, misalnya, pergantian pemerintahan yang satu ke pemerintahan berikutnya belum sepenuhnya berhasil meletakkan landasan yang kuat bagi tumbuhnya nilai-nilai kebersamaan yang inklusif seperti yang diperjuangkan para pendiri bangsa. Bahkan, yang terjadi sebaliknya. Nilai-nilai luhur itu semakin terdegradasi atau dimanipulasi untuk kepentingan kelompok atau golongan tertentu. Akibatnya, bukan proses pendewasaan berbangsa dan bernegara yang terjadi, melainkan langkah mundur menuju masa-masa gelap seperti yang terjadi pada masa sebelum kemerdekaan.

Gejala menguatnya sentimen primordial, misalnya, akibat kebijakan otonomi daerah, fundamentalisme keyakinan agama, atau perebutan sumberdaya ekonomi, menunjukkan semacam pengulangan sejarah atau paralelisme historis. Nasionalisme kita bergerak secara involutif -- bergemuruh dalam wacana tapi sepi tindakan nyata -- sehingga tidak ada peningkatan kualitas dalam praktik berbangsa dan bernegara karena setiap aktor terjebak pada kepentingan sesaat demi mengejar kekuasaan dan kedudukan.

Kondisi seperti ini jelas bertolak belakang dengan pemikiran dan perjuangan tokoh-tokoh pergerakan nasional pada awal abad ke-20, yang secara spesifik dapat dilihat dari sepak terjang para pendiri organisasi Budi Utama. Meskipun para tokoh yang masih relatif muda itu mempunyai cara dan strategi perjuangan yang berbeda-beda, dan keyakinan politik yang tidak selalu sama, mereka disatukan oleh cita-cita yang sama yaitu mengubah keadaan yang jauh dari nilai-nilai kemanusiaan akibat penindasan dan tekanan. Sentimen primordial dieliminir dan kemudian dibangkitkan rasa kebersamaannya sebagai

bangsa yang memiliki pengalaman sejarah yang sama, sebagai dasar untuk mewujutkan cita-cita yang lebih besar.

Di tengah-tengah kegalauan bangsa yang semakin akut, menengok kembali pemikiran dan perjuangan para tokoh pendiri organisasi Budi Utama dalam membebaskan bangsanya dari ketertindasan cukup relevan. Membicarakan Budi Utama dalam konteks kekinian bukan untuk memperdebatan fakta keras kebenaran organisasi itu, tetapi untuk menggali kembali mutiara pemikiran atau gagasan para tokoh-tokohnya yang dapat dijadikan sumber inspirasi dalam mengatasi persoalan bangsa yang semakin kompleks saat ini dan nanti. Dalam konteks seperti ini, sesungguhnya nasionalisme adalah proyek/agenda bersama untuk sekarang dan masa mendatang, untuk mewujutkannya tidak akan pernah selesai sepenuhnya (Anderson, 1999: 3).

KESADARAN KOLEKTIF

Seperti dicatat dalam sejarah, Budi Utomo lahir pada 20 Mei 1908 atas prakarsa para siswa STOVIA di Jakarta. Dr. Wahidin Soedirohoesodo (1857-1917) adalah inspirator bagi pembentukan organisasi modern pertama untuk kalangan priyayi Jawa. Dialah yang pertama kali bergerak menghimpun beasiswa guna memberikan pendidikan Barat bagi golongan priyayi Jawa. Ketika berkunjung ke STOVIA, usahanya ini mendapatkan tanggapan positif dan kemudian disepakati membentuk organisasi pelajar untuk memajukan kepentingan priyayi.

Pada bulan Mei 1908 dibentuklah Budi Utomo, Oleh anggotanya nama organisasi ini diterjemahkan ke dalam bahasa Belanda sebagai *het schooner striven* (ikhtiar yang indah). Namun menurut konotasi bahasa Jawa yang beraneka ragam, nama itu mengandung arti cendekiawan, watak, atau kebudayaan yang mulia (Ricklefs, 2005: 344). Usaha mulia yang semula hanya digerakkan oleh beberapa orang priyayi rendah, yang menyadari pentingnya perubahan masyarakat menuju ke keadaan yang lebih baik melalui pendidikan, kemudian mendapatkan

sambutan luas dari berbagai kalangan. Hal ini terbukti dari pertemuan pertama yang diadakan BU, dihadiri oleh beberapa perwakilan dari STOVIA, OSVIA, sekolah-sekolah guru, sekolah pertanian, dan sekolah kedokteran hewan. Cabang-cabang BU lalu didirikan di lembaga-lembaga pendidikan itu. Bahasa Melayu, dan bukan bahasa Jawa, dipilih sebagai bahasa resmi BU.

BU bukan sekedar organisasi priyayi rendahan yang mulai tumbuh kesadarannya untuk mengubah keadaan, juga bukan sekedar organisasi yang lingkup perjuangannya terbatas di wilayah Jawa dan Madura, serta bukan sekedar organisasi yang bergerak di bidang sosial ekonomi kebudayaan yang bersifat *cooperatif* terhadap kebijakan pemerintahan kolonial.

Melalui beberapa tokohnya, BU telah berjuang menumbuhkan kesadaran kolektif masyarakat untuk melakukan perubahan. Dengan caranya masing-masing, para tokoh BU telah meletakkan dasar-dasar perjuangan dalam menghadapi tantangan zamannya. Setelah BU berdiri, di Batavia berdiri organisasi-organisasi baru di kalangan elit terpelajar, seperti Tri Koro Dharmo yang kemudian berubah namanya menjadi *Jong Java*, *Jong Sumatranen Bond*, *Studerenden Vereeniging Minahasa*, *Jong Ambon*, Sarekat Ambon, Pasundan, *Timorsch Verbond*, Kaum Betawi, dll.

Untuk memahami strategi perjuangan para tokoh BU dalam melakukan perubahan, secara singkat berikut akan diuraikan pemikiran tokoh-tokoh BU yaitu Soetomo, Soewardi Soerjaningrat, dan Tjipto Mangoenkoesoemo.

Pada awal berdirinya, BU dipimpin oleh Soetomo, seorang pemuda dari Jawa Timur yang kemudian menjadi salah satu pemimpin nasionalis yang terkemuka dari generasinya. Pada 1924 ia mendirikan Klub Studi Indonesia di Surabaya, Partai Bangsa Indonesia 1930, dan Parindra 1935. Ia merupakan tokoh sentral dalam politik Indonesia sebelum kemerdekaan. Ia merepresentasikan sifat-sifat kaum pelajar

pada awal abad ke-20 yang disebut muda, maju, dan sadar (Anthony Reid dan David Marr, 1983: 6).

Nasionalisme berkaitan erat dengan visi dan harapan di masa depan. Hal ini dapat dilihat dari nama-nama organisasi pemuda yang dibentuk pada awal pergerakan: *Jong Java*, Indonesia Muda, *Jong Islamientenbond*, *Jong Minahasa*. Nama-nama organisasi ini jelas menegaskan orientasi mereka pada masa depan dengan basis sosialnya kaum muda (Ben Anderson, 2001).

Lahirnya kesadaran nasional yang mempunyai visi jauh ke depan menandai zaman maju, sadar, bangkit, yang menggantikan zaman *Kala Bendu* atau *Kala Tida* (zaman kegelapan) seperti yang digambarkan begitu indah oleh Pujangga Karaton Surakarta, Ronggowarsito: // *Mangkya darajating praja/kawuryan wus sunya ruri/rurah pangrehing ngukara/karana tanpa palupi/ponang parameng kawi/kawileting tyas maladkung/kungas kasudiranira/tidem tandaning dumadi/ardayeng rat dening karoban rubeda*// (adapun derajat Negara, tampak sudah sunyi senyap, penguasaan kalimat sudah mundur, disebabkan tiadanya teladan, adapaun sang pujangga utama, terbelit oleh hati yang penuh cinta, tersiar kerendahan derajatnya, padam segala tanda kehidupan, terasakan dunia yang kebanjiran kemalangan) (Ben, 1983: 2). Dalam cara berfikir orang Jawa yang bercorak siklus (*cakra manggilingan*), setelah masyarakat dilanda kegelapan akan segera datang zaman keemasan/kemakmuran. *Kala Bendu* akan digantikan zaman *kerta* yang penuh kedamaian. Maka, bukanlah suatu kebetulan bila datangnya zaman pencerahan, kemajuan, kemoderan pada awal abad ke-20, dilambangkan oleh lahirnya organisasi BU yang lahir pada 20 Mei 1908 yang disebut “Fajar Nasionalisme Indonesia”, cahaya yang menyibak kegelapan (Nagazumi, 1972). Surat kabar, majalah, dan terbitan lainnya berisi bayangan tentang cahaya gemerlapan ini. Judul buku kumpulan surat-surat Kartini, *Habis Gelap terbitlah Terang*, juga melambangkan hal yang sama.

Namun, istilah Boedi Oetomo pernah diejek oleh para *regent*,

golongan *established* yang mempunyai kedudukan tinggi dalam struktur masyarakat Jawa saat itu. Istilah Boedi Oetomo dipelesetkan menjadi *Boedi Olo* (pikiran bengkok, upaya bengkok). Ejekan ini terjadi pada saat pemerintah Belanda memberi tekanan keras kepada para *regent* agar tidak mendukung persatuan itu (Scherer, 1985: 71-72).

Nada ejekan yang sama juga diberikan oleh sebagian kaum ningrat di Yogya yang selalu menyebut Boedi Oetomo sebagai *Boedi Toemo* (jiwa kutu) karena anggota Boedi Oetomo bukan berasal dari para pangeran tetapi dari rakyat biasa (*'toemo'* kutu) yang biasa hidup menderita. Boedi Oetomo sebagai sarana untuk membangkitkan kesadaran nasional –kesadaran akan keanggotaan dan tanggungjawab penuh kepada segolongan rakyat atau kepada suatu masyarakat di mana konsep- Indonesia dan Jawa hampir terwujud– ternyata menghadapi banyak rintangan.

PEMBARUAN SOSIAL

Gagasan mengenai pembaruan sosial pada awal abad ke-20 diperkenalkan oleh beberapa tokoh pergerakan. Tokoh penting pertama yang perlu disebut adalah Soetomo (1888-1938). Sebagai salah satu siswa STOVIA yang cukup menonjol, pemikiran Soetomo sangat diwarnai oleh latar belakang keluarga dan lingkungan budayanya. Soetomo adalah termasuk golongan priyayi profesional dan sekaligus priyayi birokrat karena ayahnya adalah seorang guru yang kemudian beralih menjadi wedana. Kakeknya adalah seorang kepala desa yang kaya dan disegani di desanya. Baik dari garis ayah maupun ibunya, keluarga Soetomo sangat kuat memegang teguh nilai-nilai budaya Jawa yang menekankan pada keharmonisan hubungan manusia dengan alam, antarmanusia, dan dengan Tuhan. Di samping tetap menjunjung tinggi adat Jawa khususnya bahasa Jawa Kromo dalam komunikasi keluarga, keluarga Soetomo mempraktikkan tradisi Jawa lama seperti *tirakat*, berpuasa, dan laku *asketik* lainnya dalam rangka meraih cita-

cita keduniawian yang diinginkan. Meskipun Soetomo kemudian dididik menjadi seorang terpelajar yang modern dan rasional berkat pendidikan Barat yang diperolehnya, ia tetap menjadi seorang priyayi Jawa yang memegang teguh adat dan tradisi nenek moyangnya.

Soetomo menempuh strategi perjuangan yang moderat dan berusaha menjaga keharmonisan dengan lingkungannya. Dalam pemikiran Soetomo, perubahan harus berjalan seperti irama musik gamelan di mana masing-masing mempunyai peran yang sama penting untuk menghasilkan suara merdu gamelan. Bila salah satu saja dari unsur gamelan itu melenceng dari *pakem* irama *gendhing*, bunyi gamelan menjadi *blero* alias *fals* dan rusaklah irama *gendhing* yang seharusnya dibunyikan. Analog dengan ini, perubahan masyarakat Jawa hanya mungkin dilakukan dengan baik bila perubahan itu dilakukan secara gradual tanpa harus mengusik keharmonisan yang telah terbangun mapan. Masing-masing orang harus memahami posisi dan perannya sehingga harmoni sosial akan tercipta tanpa harus memandang rendah antara yang satu dengan yang lain. Semuanya mempunyai fungsinya masing-masing dan harus menjalankan fungsinya itu secara sadar dan ikhlas.

Berdasarkan kerangka pemikirannya seperti itu, Soetomo lebih banyak melakukan pembaruan sosial melalui kegiatan-kegiatan sosial, ekonomi, dan kebudayaan daripada melalui gerakan politik. Misalnya, ia mendirikan lembaga ekonomi seperti koperasi dan bank, memperluas pengajaran (*studi fonds*, *studi club*), perbaikan kesehatan dan pertanian. Jadi, Soetomo lebih banyak melakukan aksi nyata melalui kegiatan sosial ekonomi dan menghindari konfrontasi dan konflik. Oleh karena itu, Soetomo tidak pernah mempertanyakan hubungan kekuasaan yang berlangsung di Hindia Belanda dan menghindari gerakan politik. Soetomo bergerak melakukan perubahan dengan cara masuk kedalam sistem yang sudah ada. Struktur lama (kolonial, feodal) tidak digugatnya, melainkan dijadikan alat perjuangannya. Pemikiran dan strategi perjuangan Soetomo seperti itu berbeda dengan yang

dilakukan tokoh-tokoh lainnya yang lebih progresif dan radikal. Bagi kaum radikal, misalnya Tjipto, pandangan seperti ini ditolak keras karena dianggap menyembunyikan realitas yang sesungguhnya. Masyarakat yang hirarkis-feodalistis dipandang sebagai tatanan sosial yang eksploitatif sehingga harus dibongkar dan dilenyapkan.

Tokoh BU yang kedua adalah Soewardi Soerjaningrat (1889-1959). Pemikiran Soewardi dipengaruhi oleh latar belakang keluarganya yaitu aristokrasi Jawa terkemuka, Paku Alam. Pada awal karir politiknya, ia cukup termasuk tokoh yang radikal. Tindakan politik ia anggap sebagai alat pembaharuan sosial. Salah satu artikelnya, yang ditulisnya di *De Express* pada Juli 1913, "Seandainya saya orang Belanda" (*als ik eens Nederlander was*), mencerminkan keberaniannya dalam mengkritik pemerintah kolonial. Tulisan itu menyindir pemerintah Hindia Belanda yang hendak mengadakan peringatan kemerdekaan Belanda dengan cara minta sokongan penduduk pribumi. Secara berani Suwardi mengatakan: "...apakah akan ada keuntungan di Hindia dari peringatan itu, jika peringatan itu harus dilakukan di negeri jajahan ini? Akan terjadi konfrontasi satu lawan satu dalam masyarakat itu. Ataukah kita ingin menyombongkan kekuatan kita dalam arti politik? Terutama dalam masa-masa ini ketika rakyat Hindia baru saja mengorganisasikan diri mereka, yang masih setengah gelap. Secara taktis tidaklah tepat memberikan suatu contoh bagaimana mereka seharusnya memperingati kemerdekaannya. Harapan-harapan mereka sedang didorong, secara tidak sadar kita turut membangunkan keinginan dan aspirasi mereka, demi terwujudnya kemerdekaan di masa mendatang..." (Scherer, 1985: 89-90).

Dalam melakukan pembaruan sosial dan memperluas kesadaran bersama bagi penduduk pribumi, setelah dia dijatuhi hukuman akibat kritiknya itu, Suwardi mulai bergerak melalui cara-cara yang relatif moderat. Ia kemudian mendirikan Taman Siswa pada 1922 sebagai jawaban atas perkembangan kebudayaan Jawa. Namun harus dicatat, meskipun ia telah menghentikan kegiatan politiknya dan menggantikan

pandangan pembaruan sosialnya yang radikal dengan kegiatan yang menjurus pada pengagungan kebudayaan Jawa, ia tidak pernah membuat kompromi apapun sepanjang sikapnya yang anti-Belanda dan anti-dominasi asing, dan tetap berdiri di luar pemerintahan kolonial. Kemandirian dan kebebasan menjadi prinsip dasar pemikiran Suwardi dalam melakukan pembaruan sosial masyarakat saat itu

Mengenai pentingnya menempatkan kebudayaan Jawa dalam menghadapi pengaruh asing, Suwardi menolak gagasan yang menempatkan bahasa Belanda lebih tinggi dalam pergaulan sosial masyarakat Hindia, suatu bahasa yang mendiktekan kemajuan Barat terhadap penduduk pribumi. Bagi Suwardi, bukan bahasa asing, apapun jenisnya, yang terpenting dalam pergaulan di Hindia, tetapi "...bahasa dan rakyat adalah satu. Tidak wajar membunuh suatu bahasa dengan sengaja agar membuat suatu tempat bagi yang baru, apalagi bahasa asing" (Scherer, 97). Suwardi menghendaki agar orang Indonesia mempertahankan suatu integritas kebudayaan secara konsekuen yang didasarkan atas warisan kebudayaan mereka sendiri agar dapat menahan pengaruh kebudayaan asing. Suwardi sibuk membangun benteng pertahanan kebudayaan dengan adukan semen dan batu-batu lama yang sama, mengerjakannya dengan orang-orang lama yang sama. Sistem sekolah Taman Siswa-nya dibangun dengan suatu pandangan seperti itu dalam pemikirannya (Scherer, 108). Namun, jalan yang ditempuh Suwardi sesungguhnya punya makna penting agar orang mau mawas diri dan menemukan landasan yang kokoh sebelum nenapaki jalan-jalan baru yang hendak dilaluinya. Nilai-nilai Jawa menjadi sumber yang cukup untuk membangun integritas dan kesadaran nasional rakyatnya.

Pembaharuan sosial yang ditawarkan tetap berangkat dari atau kompatibel dengan tatanan yang ada, yang menempatkan kaum aristokrat sebagai pemimpin rakyat yang akan menuntun mereka ke arah kemajuan dan pembaruan. Bagi Suwardi, perubahan harus dimulai dari kalangan intern priyayi karena dari sanalah perubahan

secara keseluruhan dimulai. Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa dalam masyarakat paternalistik yang hirarkis dan berorientasi ke atas, priyayi menjadi simpul keluhuran dan keagungan. Tugas priyayi adalah mendidik dan mengajarkan kebajikan kepada golongan masyarakat lain di bawahnya (*ing ngarsa sung tulada, ing madya mangun karsa, tut wuri handayani*).

Berbeda dengan dua tokoh sebelumnya, Tjipto Mangoenkoesoemo (1886-1943) adalah seorang pembangkang yang mengidentikkan dirinya dengan kaum *kromo* (rakyat biasa). Ia berasal dari keluarga priyayi rendahan. Ayahnya seorang guru bahasa Melayu di sekolah dasar pribumi (HIS). Tjipto adalah seorang dokter kesehatan pribumi yang sangat terkenal karena keberanian dan pengabdianya. Dalam membangun kesadaran nasional, Tjipto mengambil langkah tegas yakni menolak tananan masyarakat Jawa yang dianggap feodalistik dan sekaligus penentang utama sistem kolonial yang eksploitatif yang dibangun di atas budaya Jawa lama. Akibatnya, dalam memperjuangkan gagasan-gagasannya yang radikal itu Tjipto akhirnya harus terasing dari kaum yang dibelanya (*kromo*) karena menjalani pembuangan. Ia juga “terasing” dari kelompok intelektual seangkatannya yang umumnya lebih memilih jalan kooperatif dengan pemerintah kolonial.

Pendirian Tjipto berbeda dengan Sotomo dan Soewardi. Dua orang yang disebutkan terakhir mengemukakan konsep-konsepnya dengan membujuk rakyat untuk menerima perbedaan yang lazim dalam masyarakat mereka, menghormati perbedaan itu, apakah perbedaan itu menyangkut peranan sosial, kedudukan, tanggungjawab, keistimewaan, dan hak-hak mereka. Dengan demikian, pembahasan tentang ketidakadilan sosial yang melembaga dalam bentuk sosial, dihindarkan secara hati-hati. Sementara Tjipto sangat peka terhadap ketidakadilan itu, yang dibangun di atas landasan pranata lama dalam masyarakat Jawa maupun pranata kolonial yang datang kemudian. Tjipto membedakan dirinya dengan tokoh-tokoh lainnya. Ia tidak mengusung ideologi tertentu dalam melakukan pembaruan sosial. Ia tidak

menawarkan pola jadi untuk menggantikan yang telah ada. Konsep-konsepnya tidak mewakili keyakinan ideologi politik Barat maupun Islam. Namun pada awal karir politiknya, Tjipto mempunyai kepercayaan besar pada sistem pemerintahan Barat yang mengagungkan hak asasi individu, dan merasa bahwa hanya melalui sistem itu penyelamatan rakyat Indonesia yang tertindas dapat diwujudkan.

Dalam konteks seperti itu, tindakan politik yang diinginkan Tjipto adalah untuk bekerja menuju terciptanya masyarakat baru yang bersatu di masa mendatang, yang terdiri dari masyarakat pribumi dan Belanda, hidup bersama dalam keselarasan, menghormati satu sama lain sebagai orang-orang yang sederajat. Bila hal itu tercapai, maka masalah pemisahan antara penjajah dan terjajah, antara yang memerintah dan yang diperintah tidak menjadi persoalan lagi (Scherer, 1985: 151).

CATATAN AKHIR

Para tokoh yang aktif dalam organisasi Budi Utomo telah memberi pelajaran berharga kepada kita bahwa upaya melakukan pembaharuan sosial membutuhkan komitmen dan keteguhan prinsip. Beberapa aspek penting yang nampak dari organisasi BU dalam rangka membangkitkan kesadaran nasional, sebagaimana ditunjukkan oleh para tokoh-tokohnya, adalah pertama, adanya kesadaran kolektif tentang pentingnya perubahan; kedua, adanya sumberdaya yang dapat dimobilisasikan; dan ketiga, adanya tujuan yang hendak dicapai. Tumbuhnya kesadaran kolektif menemukan lahannya yang subur di lembaga-lembaga pendidikan modern. Di sanalah para pemuda (pelajar) mulai berfikir tentang pentingnya perubahan sosial menuju masyarakat yang lebih terbuka dan modern, bebas dari tekanan dan penindasan. Untuk itu, mereka menganggap bahwa sintimen primordial sudah saatnya harus ditinggalkan dalam rangka membangun masyarakat baru yang terbebas dari ikatan-ikatan lama yang sempit

dan eksploitatif. Hadirnya kelompok pelajar (*hominis novi*) dalam masyarakat menjadi sumberdaya penting – selain modal sosial budaya – yang dapat dimobilisasikan untuk keperluan pembaruan sosial. Mereka adalah modal utama dan motor penggerak bagi tumbuhnya kesadaran nasional. Agar potensi dan sumberdaya itu dapat dimanfaatkan secara optimal, maka diperlukan wadah/ organisasi untuk menghimpun berbagai kekuatan yang terpecah menjadi satu barisan. Dari sinilah semua pemikiran, ide, gagasan tentang pembaharuan sosial dapat diterjemahkan menjadi tindakan nyata.

Mobilisasi sumber daya secara tepat mampu mewujudkan tujuan bersama yaitu terbentuknya masyarakat baru yang bernaung di bawah NKRI. Dalam mencapai tujuan itu, seperti ditunjukkan para Bapak Pendiri Bangsa, berbagai pemikiran dan strategi ditawarkan. Perbedaan pemikiran/gagasan dan strategi yang dipilih itu bukan menjadi hambatan tetapi justru menjadi kekuatan yang memperkokoh keindonesiaan di kemudian hari.

Menjadi Indonesia adalah suatu proses yang panjang yang selalu menghadapi tantangan dalam setiap tahap sejarahnya.. Terbentuknya Negara Indonesia bukan sesuatu yang terberi (*given*) tetapi merupakan buah perjuangan panjang dari seluruh komponen bangsa. Oleh karena itu, menjadi Indonesia adalah membutuhkan komitmen dan langkah nyata semua pihak, sesuai dengan posisi/kedudukannya masing-masing, untuk mewujudkan cita-cita bersama.

Menjadi Indonesia membutuhkan langkah politik, sosial, ekonomi dan budaya, yang secara simultan bergerak menuju ke suatu tujuan bersama yaitu membangun peradaban yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Landasannya adalah Pancasila, pilarnya adalah cita-cita proklamasi kemerdekaan, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Proses keindonesiaan kita akan terus disempurnakan oleh setiap penghuninya sebagai tempat berteduh yang nyaman dan menyejukkan. Di dalam rumah seperti inilah diharapkan akan lahir karya-karya anak bangsa yang membanggakan dalam percaturan bangsa-bangsa di

dunia dan memberi sumbangan penting bagi kemuliaan bersama. Kebangkitan nasional yang kita peringati setiap tanggal 20 Mei, harus kita sikapi sebagai sebuah tugas historis dan bukan sebatas pada ritual historis belaka. Dalam mengaktualisasikan tugas sejarah ini, kita harus senantiasa menyesuaikan tantangan dan dinamika yang berkembang di sekitar kita.

REFERENSI

- Ahmad Mansyur Suryanegara, 2009. *Api Sejarah*. Salamadani Pustaka Utama.
- Anderson, Benedict, 1999. "Nationalism Today and in the Future", *Indonesia* 67 (April)
- Anderson, Benedict, "Masa Kegelapan dan Masa Terang Benderang", dalam Anthony Reid dan David Marr (eds.), 1983. *Dari Raja Ali Haji Hingga Hamka*. Grafitipers.
- Anderson, Benedict, 2001. *Imagined Community*. Insist.
- Asvi Warman Adam, 2007. *Seabad Kontroversi Sejarah*. Ombak.
- Kerdijk, Rosa M.T., 2002. *Wayang-Liederen: Biografi Politik Budaya Noto Soeroto*. Komunitas Bambu.
- Ricklefs, 2005. *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004*. Serambi
- Scherer, Savitri Prastiti, 1985. *Keselarasan dan Kejanggalan*. Sinar Harapan

BAB V

JEJAK BUDI UTOMO DI TANAH DELI SUMATERA TIMUR

Suprayitno¹

PENGANTAR

Pertimbangan untuk menulis tentang judul diatas adalah pertama, dari semua nara sumber hanya saya yang berasal dari Tanah Deli (Sumatera Timur) dan saya percaya pada kesempatan ini tidak ada yang membahas tentang judul diatas. Hal ini mungkin dapat memperluas wacana diskusi kita tentang Budi Utomo tidak hanya focus di Jawa saja. Kedua, menurut laporan Budi Utomo (BU) tahun 1921, menunjukkan perkembangan yang sangat pesat, dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Tahun 1918 jumlah cabang BU tumbuh dari 51 menjadi 90 dan jumlah anggotanya meningkat dua kali lipat dari 3.914 orang menjadi 7.804 orang. Yang menarik adalah, bahwa cabang-cabang yang paling cepat berkembang bukan terjadi di tanah Jawa, melainkan di Tanah Deli Sumatera Timur (Van Miert, 2003: 293).

Oleh sebab itu perlu dipaparkan tentang sejarah singkat organisasi para priyayi Jawa (Budi Utomo) di Tanah Deli Sumatera Timur, seperti apakah program dan peranan Budi Utomo di Sumatera Timur serta relevansinya bagi masa kini dan masa depan bangsa. Sejarah kehadiran orang Jawa di Tanah Deli akibat perluasan perkebunan tanaman keras sejak pertengahan abad ke-19. Komunitas Jawa yang dikenal oleh penduduk lokal dengan Jadel (Jawa Deli) atau Jakon (Jawa kontrak) semakin hari semakin bertambah jumlahnya dan menjadi mayoritas sejak tahun 1929 (55 %) hingga tahun 2012 (sekitar 40 %). Namun secara ekonomis kehidupan sebagian besar Kuli Jawa di Tanah Deli Sumatera

¹Ketua Program Studi Magister (S-2) Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sumatera Utara

Timur sangat menyedihkan; mendapat perlakuan buruk dari Tuan Kebon dan kurang berpendidikan. Hal inilah yang menyebabkan para priyayi Jawa (terutama dokter) yang bekerja sebagai pegawai kolonial di Medan membuka cabang Budi Utomo di Deli mengikut sejawatnya di Jawa sebagai alat untuk membela nasib rakyat di Sumatera Timur. Mereka akhirnya menyemai benih nasionalisme di Sumatera Timur.

Semangat Budi Utomo akhirnya mengilhami sebagian generasi muda Jawa untuk terlibat dalam perjuangan mempertahankan dan mengisi kemerdekaan di Sumatera Timur (Utara), sehingga mereka lebih senang dikenal sebagai Pujakesuma daripada Jadel/Jakon (sebutan hina untuk mereka yang bekerja sebagai kuli kebon). Namun agar pembahasan lebih pas dan kronologis, sebaiknya dijelaskan dahulu tentang geografi dan demografi Sumatera Timur.

GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI SUMATERA TIMUR²

Tanah Deli sekarang letaknya di Kota Medan dan sebagian Kabupaten Deli Serdang. Dahulu masuk wilayah Kerajaan Deli, Sumatera Timur. Sampai pertengahan abad ke-19, Sumatera Timur didiami oleh kelompok etnis Melayu, Karo dan Simalungun. Mereka inilah yang dikenal sebagai penduduk “asli” Sumatera Timur.³ Wilayah Sumatera Timur yang dihuni etnis Melayu Pesisir membentang dari

²Uraian geografi dan demografi Sumatera Timur dalam makalah ini dikutip kembali dari Suprayitno, *Mencoba Lagi Menjadi Indonesia*. Yogyakarta: Yayasan Untuk Indonesia, 2001, hlm. 15-21.

³Anthony Reid menyebut Sumatera Timur sebagai kampung halamannya penduduk melayu, Batak Karo dan Batak Simalungun yang bekerja sebagai petani. Anthony Reid, *Perjuangan Rakyat: Revolusi dan Hancurnya Kerajaan di Sumatera*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1987), hlm. 87; Mahadi, *Sedikit “Sejarah Perkembangan Hak-hak Suku Melayu Atas Tanah di Sumatera Timur” (1800-1975)*, (Bandung: Alumni, tanpa tahun), hlm. 6; Teungku Lukman Sinar, *Sari Sejarah Serdang*, Jilid I, (Medan: tanpa penerbit, 1976), hlm.17.

perbatasan Aceh Tamiang sampai ke kerajaan Siak⁴. Etnis Melayu adalah golongan bangsa yang menyatukan dirinya dalam pembauran ikatan pekawinan antar etnis serta memakai adat resam dan budaya Melayu secara sadar dan kontinu.⁵ Etnis Melayu mayoritas beragama Islam, sehingga dikenal dengan istilah dengan masuk Melayu berarti masuk Islam”.⁶

Manakala orang Simalungun yang mendiami daerah dataran tinggi Simalungun sudah memiliki lembaga pemerintahan kerajaan. Mereka ada juga yang menetap di daerahdaerah kerajaan Melayu, bahkan ada yang sudah jadi Melayu dan mendirikan kerajaan, umpamanya di Padang-Bedagai. Sistem Pemerintahan kerajaan tradisional Simalungun hampir mirip dengan pemerintahan kerajaan Melayu.⁷

Sementara orang Karo mendiami wilayah Dataran Tinggi Karo, yang didalamnya tidak ditemui sistim pemerintahan kerajaan. Pemerintahan terkecil adalah kute (kampung) yang didirikan oleh marga tanah tertentu. Gabungan kuta disebut kesain yang dikepalai oleh seorang kesain (penghulu). Kampung induk disebut perbapaan, sedangkan kampung anak disebut dusun. Gabungan dari perbapaan dan dusun-dusun disebut urung. Urungurung ini kemudian membentuk sebuah federasi yang dikenal dengan sibayak. Pada saat melakukan gerakan fasifikasi ke Tanah Karo, Belanda menjumpai banyak sekali urung. Demi

⁴Staatsblad van Nederlansch-Indie, 1908, No. 604.

⁵T. Lah Husni, *Revolusi sosial 1946 di Sumatera Timur/Tapanuli disertai Pangkal dan Akibatnya* (Medan, B.P. Husni, 1983).

⁶T. Lukman Sinar, *Sari Sejarah Serdang*, Jilid I, (Medan: tanpa penerbit, 1976), hlm.17.

⁷Tim Penulisan Sejarah Pemda Prop. Sumut, *Sejarah Perkembangan Pemerintahan Pegawai dalam Negeri Di Provinsi Dati I Sumatera Utara, Msa Pemerintahan Kolonial*, (Medan: Diklat Propsu., 1990), hlm. 124. Selanjutnya disingkat TIM PEMDASU.

efisiensi Belanda hanya mengakui 15 urung dan akhirnya mengangkat 5 pemimpin mereka yang paling berpengaruh sebagai sibayak.⁸

Sumatera Timur adalah daerah dataran rendah yang sangat luas. Di daerah ini terdapat hutan Payau (mangrove) yang ditumbuhi oleh pohon bakau dan nipah. Banyak sekali dijumpai sungai-sungai yang bermuara ke Selat Malaka. Di sepanjang sungai-sungai itu, terutama di muara sungai, tumbuh dengan lebat pohon nipah dan bakau. Sungai yang berhulu di Dataran Tinggi Karo dan Simalungun itu membawa sisasisa debu halus, pasir serta tanah gembur. Endapan lumpur yang dibawa sungai-sungai itu luasnya rata-rata 30 Km.⁹ Akibatnya daerah Pantai Timur bertambah luas masuk ke Selat Malaka.

Tanah-tanah di sepanjang Pantai Timur Sumatera ini menjadi lahan subur untuk pertanian. Menurut Karl J. Pelzer luas seluruh daerah Sumatera Timur adalah 31.715 Km persegi.¹⁰ Di wilayah ini terdapat beberapa kerajaan seperti Deli Serdang, Asahan, Langkat, Kualuh, Bilah, Panai, Kota Pinang, Kerajaan Dolok Silau, Silimakuta, Purba, Raya, Pane, Siantar, Tanah Jawa dan lain-lain. Manakala di daerah Tanah Karo terdapat Sibayak Kutabuluh, Sarinembah, Lingga, Suka, dan Barus Jahe yang dinaikkan statusnya oleh Pemerintah Belanda setara kerajaan.¹¹

⁸TIM PEMDASU, *Ibid.*, h1m. 125126, Anthony Reid, *op. cit.*, h1m., 100104, Nas Sebayang, "Dasar-Dasar Bentuk Susunan Pemerintahan Tradisional Karo", (Medan : 1990), h1m. 89. Orang-orang Karo juga tersebar di Kerajaan Melayu : Langkat, Deli dan Serdang. J.H. Neumann, *Sedjarah Batak Sebuah Sumbangan*, (Jakarta : Bhadrata, 1972).

⁹Karl J. Pelzer, *Toen Keboen dan Petani : Politik Kolonial dan Perjuangan*, (Jakarta : Sinar Harapan, 1985), h1m. 34.

¹⁰*Ibid.*, hlm. 31.

¹¹Michael van Langenberg, " Class and Ethnic Conflict in Indonesia's Decolonization Process : A Study of East Sumatra". dalam *Indonesia*, No. 33 April 1982, Cornell Southeast Asia Program, h1m. 3, catatan No. 2 dan Peta 1, dan juga T. Luckman Sinar, *Sumatera Utara Dibawah Kekuasaan Hindi Belanda Sampai Awal Abad keXX*. (Medan : tanpa tahun dan penerbit), h1m. 115127.

Hubungan antara rajaraja Melayu dengan Pemerintah Belanda mulai intensif ketika Pemerintah Belanda melancarkan politik ekspansionismenya ke Sumatera pada pertengahan abad ke-19.¹² Pengaruh Belanda semakin kuat setelah Sultan Serdang (Basyaruddin) menandatangani perjanjian dengan Pemerintah Belanda pada tanggal 16 Agustus 1862. Perjanjian yang dikenal dengan *Acte van Erkenning* itu menyatakan, bahwa Sultan Serdang beserta daerah takluknya Padang Bedagai, Denai, Pertjoet, Perbaungan termasuk daerah kekuasaan Siak Sri Indrapura. Setelah itu menyusul kerajaankerajaan lainnya seperti; Asahan pada tanggal 2 Maret 1886, Langkat, tanggal 21 Oktober 1885, Bilah tanggal 11 Agustus 1862, Kota Pinang tanggal 2 Oktober 1864, dan sebagainya.¹³

Pada tanggal 15 Mei 1873, Tamiang, Langkat, Deli, Serdang, Batubara, Asahan, Panai, dan Bilah dijadikan menjadi satu wilayah Residensi Sumatera Timur yang berkedudukan di Bengkalis.¹⁴ Mengingat perkembangan ekonomi yang begitu pesat di Sumatera Timur, maka pada tahun 1887 ibukota Residensi Sumatera Timur dipindahkan ke Medan. Pada saat itu Residensi Sumatera Timur dibagi dalam lima Afdeling, yakni Asahan, Labuhan Batu, Bengkalis, Deli, dan Batubara.¹⁵

¹²T. Luckman Sinar, *op. cit.*, 1976, hlm. 63-64.

¹³Mededeelingen van de Afdeeling Bestuurszaken der Buiteneuweaten van hat Departement Rinnenlandsch Bestuur, Serie A No. 3, (Weltevreden, Landsdrukkerij, 1929), h1m. 14, 6264, 8789, dan 163166., dan M. Said, Koeli Kontrak Tempoe Doeloe, (Medan, Waspada, 1977), h1m. 23.

¹⁴T. Luckman Sinar, *Konsep Sejarah Kabupaten Daerah Tingkat U Deli Serdang*, (Medan: Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang, 1986), h1m. 154.

¹⁵TIM PEMDASU. *op. cit.*, h1m. 36.

Memasuki awal abad ke-20 Pemerintah Belanda mulai melakukan penaklukan ke wilayah Simalungun, Tanah Karo, Toba, dan PakPak Dairi.¹⁶ Diantara tahun 1870-1942 wilayah dan penduduk dari 41 kerajaan di Sumatera Timur telah digabungkan ke dalam kekuasaan Hindia Belanda. Semua kontrak politik yang telah ditandatangani antara kedua belah pihak, akhirnya telah mereduksi jumlah kerajaan itu menjadi 34 kerajaan.

Kerajaan-kerajaan itu telah diberi batas-batas wilayah tertentu dan secara bersama-sama digabungkan sebagai Residensi Sumatera Timur. Pada tahun 1915, Residensi Sumatera Timur dinaikkan statusnya menjadi Propinsi Sumatera Timur yang membawahi lima Afdeling, yaitu Deli en Serdang, ibukotanya Medan. Langkat ibukotanya Binjai, Simalungun en Karolanden ibukotanya Siantar, Asahan ibukotanya Tanjung Balai, dan Bengkalis ibukotanya Bengkalis.¹⁷

Masyarakat Sumatera Timur telah dijamin oleh penguasa Belanda sebagai penduduk asli dengan hak-hak istimewa atas tanah sesuai dengan hukum adat.¹⁸ Hak istimewa inilah yang kemudian menimbulkan kecemburuan sosial dikalangan masyarakat pendatang (migran). Dengan adanya penyusunan kembali wilayah kerajaan di Sumatera Timur, maka Belanda secara otomatis telah memasukkan daerah Sumatera Timur ke dalam struktur birokrasi kolonial yang terpusat di Batavia. Ini bermakna bahwa Belanda telah berhasil menyatukan wilayah kerajaan yang belum pernah memiliki kesatuan politik dan administratif. Di samping itu, Belanda juga telah menghubungkan Sumatera Timur dengan Jawa. Dengan cara demikian Sumatera Timur telah memiliki identitas baru.

¹⁶T. Luckman Sinar, *Sumatera Utara....*, h1m. 3350, dan Mededeelingen, *op. cit.*, h1m. 549564.

¹⁷T. Luckman Sinar, *op. cit.*, 1986/1987, h1m. 238-239.

¹⁸Mahadi, *loc. cit.*

BUDI UTOMO DI SUMATERA TIMUR

Sejak pemerintah Belanda menguasai daerah Sumatera Timur maka terjadilah perubahan dalam polapola kependudukan dan pelapisan sosial di Sumatera Timur. Aspek penting yang berkaitan dengan ditegakkannya kekuasaan kolonial Belanda atas masyarakat di Sumatera Timur adalah perkembangan perkebunan. Sebelum datangnya Belanda dan munculnya industri perkebunan, Sumatera Timur adalah “hutan belantara dengan sedikit keuntungan ekonomi”. Namun dalam beberapa dekade saja Sumatera Timur telah berubah menjadi salah satu daerah penghasil tembakau terpenting di Hindia Belanda. Sejalan dengan meluasnya birokrasi kolonial dan perkembangan perkebunan, muncullah kotakota besar di Sumatera Timur. Kota-kota seperti Medan, Pematang Siantar, Tebing Tinggi, dan Binjai merupakan pusat penyaluran berbagai hasil perkebunan dan juga pusat administrasi pemerintahan kolonial yang menghubungkan daerahdaerah pedalaman tempat perusahaanperusahaan perkebunan berada. Di kota-kota ini bermikumlah kaum pendatang yang berasal dari luar daerah Sumatera Timur, seperti dari Pulau Jawa, Sumatera Barat, Tapanuli dan lain sebagainya. Mereka pada dasarnya tertarik dengan kehidupan yang serba menjanjikan harapan di kotakota tersebut. Dengan alasan itu mereka berusaha memasuki daerah Sumatera Timur untuk bekerja di kotakota besar dan sekaligus menjadi warga kota.

Salah satu yang mewarnai perkembangan kotakota di Sumatera Timur dan menjadi ciri dari kehidupan kota adalah munculnya organisasi-organisasi baik sosial maupun politik. Di Sumatera Timur, secara umum dorongan untuk membentuk organisasiorganisasi itu berkaitan dengan usaha pembelaan terhadap kondisi para kuli kontrak, pengambilalihan tanahtanah penduduk oleh perusahaan perkebunan, dan penyebarluasan gagasan kebangsaan oleh kaum pergerakan.

Hal ini sejalan dengan meningkatnya hubungan dengan pulau Jawa akibat meluasnya jaringan komunikasi dan transportasi, serta

perkembangan Bahasa Melayu (Indonesia). Memasuki awal abad ke20, ekonomi perkebunan dan pemerintah kolonial Belanda telah bersamasama membawa perubahan penting pada masyarakat di Sumatera Timur. Perubahan itu tidak saja dalam pola-pola demografi,¹⁹ tetapi juga menyangkut perubahan dalam aspek politik.

Artinya bersamaan dengan berkembangnya daerah Sumatera Timur menjadi daerah industri perkebunan dan terintegrasinya daerah itu ke dalam sistem politik dan ekonomi kolonial Belanda, maka telah masuk pula gagasan kebangsaan dan sistem organisasi sosial modern ke wilayah tersebut. Pada tahun 1930an. Medan adalah kota yang paling bersifat Indonesia di Indonesia. Sifat “keindonesiaanya” menjadikan kota Medan menjadi tempat dimana organisasi organisasi kaum nasionalis yang ada di Jawa berusaha membuka cabangnya di kotakota besar Sumatera Timur.²⁰

Organisasi pertama yang menyuarakan pembelaanya *kepada* para kuli kontrak di perkebunan Sumatera Timur adalah Budi Utomo. Budi Utomo dibentuk di Medan oleh sekelompok kecil pegawai pemerintah yang berasal dari Jawa pada tahun 1908, sekitar dua bulan setelah organisasi induknya dibentuk di Jawa²¹. Sebagaimana organisasi induknya di Jawa, Budi Utomo cabang Medan juga berusaha memajukan orang Jawa dengan memberikan penekanan pada budaya Jawa sambil berusaha untuk mengembangkan hubungan yang harmonis

¹⁹Berdasarkan sensus tahun 1930 jumlah suku Jawa menjadi mayoritas yakni berjumlah 589.836 jiwa dan suku Melayu, Karo dan Simalungun sebagai penduduk asli hanya berjumlah 578.433. Anthony Reid, *Perjuangan Rakyat: Revolusi dan Hancurnya kerajaan di Sumatera*, Jakarta: Sinar Harapan, 1987, hlm. 85.

²⁰Anthony Reid, *op. cit.*, hlm. 109110.

²¹Michael van Langenberg, dalam Audrey R. Kahin, *op. cit.*, hlm. 116. Budi Utomo dibentuk di Jawa atas prakarsa Dr. Wahidin Sudirohusodo dan siswa sekolah STOVIA seperti Raden Soetomo dan Raden Goenawan Mangoenkusumo, baca George Mc Turnan Kahin, *Refleksi Pergumulan Lahirnya Republik Nasionalisme dan Revolusi di Indonesia*, Sebelas Maret University Press & Pustaka Sinar Harapan, Solo-Jakarta, hlm. 83-84.

antara pemerintah kolonial dan rakyat Hindia Belanda. Tokoh-tokoh Budi Utomo di Sumatera Timur adalah beberapa dokter asal Jawa yang bertugas di daerah ini antara lain Dr. Pringadi, Dr. Suradji, Dr. Abdul Manap, Pawiro Sumo, Sudarminto dan Yahya.

Budi Utomo dapat berkembang di Sumatera Timur adalah karena di Sumatera Timur banyak sekali bermukim orang Jawa, terutama di daerah Perkebunan. Di kalangan orang-orang Jawa itulah organisasi BU memperoleh dukungannya. Pada tahun 1912 sebuah cabang Budi Utomo didirikan di Binjai dengan Dr. Roeslan sebagai ketuanya. Dokter Roeslan adalah dokter dari Jawa yang bertugas di Tanjung Pura. Pada tahun yang sama pula cabang Budi Utomo di Lubuk Pakam dibentuk oleh Dr. Sutomo salah seorang pendiri Budi Utomo di Jawa. Dr. Sutomo saat itu bertugas di Lubuk Pakam sebagai penasihat Sultan Serdang, Sulaiman Shariful Alamsyah. Setahun kemudian Dr. Sutomo juga mendirikan cabang Budi Utomo di Deli dengan ia sendiri sebagai ketuanya.

Sumbangan penting Dr. Sutomo dalam persoalan di Sumatera Timur adalah perhatiannya terhadap kuli kontrak yang melarikan diri. Selama menetap di Lubuk Pakam, dokter Sutomo tidak secara langsung terlibat dalam memperjuangkan nasib kuli kontrak. Namun setelah ia kembali ke Jawa tahun 1914, ia menulis dalam koran Java Bode dan isi tulisannya itu mengkritik perlakuan buruk yang dihadapi oleh kuli kontrak di perkebunan. Ia menyarankan hendaknya majikan memiliki peri kemanusiaan agar tidak terjadi pemukulan-pemukulan.

Kegiatan Budi Utomo yang lainnya ialah mendirikan sekolah-sekolah. Sekolah Budi Utomo yang pertama didirikan di Tebing Tinggi. Budi Utomo juga mendirikan HIS Budi Utomo yang ada di Lubuk Pakam, Galang, Binjai, Perdagangan, dan Medan. Sistem pendidikan di Sekolah HIS Budi Utomo sama seperti HIS yang didirikan oleh Gubernemen. Murid-murid HIS Budi Utomo dapat mennyamai lulusan HIS Gubernemen. Selain itu Budi Utomo juga berusaha memajukan kebudayaan Jawa yakni dengan mendirikan kelompok-kelompok

kesenian seperti Panem Bromo (paduan suara), tari-tarian Jawa, seni memainkan gamelan dan lain-lain. Di samping itu, Budi Utomo juga menyelenggarakan kegiatan mempelajari buku-buku klasik karangan para pujangga Jawa seperti Mpu Kanwa, Mpu Prapanca, dan Paku Buwana IV.

Buku-buku itu sangat penting karena selain mengandung nilai kesusastraan yang tinggi, juga mengandung pelajaran-pelajaran moral dan nilai-nilai sosial yang baik. Oleh karena buku itu sangat sulit dipelajari, maka para peminatnya pun sangat terbatas dan orang yang paling banyak mengetahui tentang buku-buku itu adalah Pawiro Sumo. Tokoh Budi Utomo ini sangat dihormati di kalangan anggota Budi Utomo di Sumatera Timur.²²

Di Medan Budi Utomo dipimpin oleh Raden Pirngadi, seorang dokter asal Jawa yang mendapatkan pendidikannya di STOVIA (*School tot Opleiding voor Indische Artsen* = Sekolah Kedokteran). Anggota-anggota Budi Utomo terdiri dari penduduk asal Jawa yang bekerja di Sumatera Timur sebagai ahli hukum, dokter, guru, wartawam dan pegawai pemerintah kolonial Belanda. Pada awalnya Budi Utomo tidak begitu memberikan perhatian pada para pendatang dari Jawa yang bekerja sebagai kuli di perkebunan. Namun sejak 1916, setelah menerbitkan jurnal bulannya yang bernama "Soera Djawa", barulah Budi Utomo mulai gencar membela kepentingan kaum kuli di perkebunan. Diantaranya Budi Utomo menuntut penghapusan *Poenale Sanctie* dan perbaikan terhadap kondisi kuli-kuli di perkebunan.

Soera Djawa dipimpin oleh Raden Sastro Prawiro, seorang pemimpin Budi Utomo cabang Pangkalan Berandan dan Raden Marto

²²Payung Bangun (ed.), *Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah Sumatera Utara*, Medan: Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, 1977/1978, hlm. 32-34.

Soepardjo pemimpin Budi Utomo cabang Serdang.²³ Sifat kejawaannya sangat jelas dari moto jurnal bulannya Soera Djawa yakni “Djawa yang ada di Deli Manoesia Djoega”. Maksud dari motto itu mungkin juga merupakan bagian dari usaha untuk menghapuskan citra orang Jawa yang ada di Sumatera Timur khususnya yang bekerja sebagai kuli dianggap sebagai hamba sahaya.

Pada tahun 1921 terdapat sekitar 300.000 orang Jawa di Sumatera Timur. Sebagian besar mereka bekerja sebagai buruh perkebunan. Organisasi Budi Utomo berkembang dengan pesat di Sumatera Timur pada periode ini berkat jasa Soemosoediro, Wakil Ketua Cabang Budi Utomo di Medan. Beliau berasal dari Purworedjo (Jawa Tengah), kemudian bermigrasi ke Sumatera dan sejak tahun 1910 menetap di Medan sebagai seorang “partikelir”. Di Medan beliau sangat tertarik dengan kehidupan orang Jawa yang tinggal di perkebunan dan kota-kota di Sumatera Timur.²⁴ Bersama pengurus Budi Utomo lainnya seperti, beliau berhasil mengembangkan organisasi Budi Utomo cabang Medan dan juga cabang-cabang Budi Utomo di Lubuk Pakam dan Tebing Tinggi.

Ada perbedaan antara Budi Utomo di Sumatera Timur dengan Budi Utomo di Jawa. Anggota organisasi Budi Utomo di Sumatera Timur adalah orang-orang yang berpendidikan di kalangan orang Jawa, bukan kaum buruh di perkebunan. Meskipun begitu Budi Utomo di Sumatera Timur tidak menyandang sifat kebangsawanan dan priyayi murni sebagaimana di Jawa. Pada bagian awal, Budi Utomo di Sumatera Timur adalah perhimpunan untuk mengejar kepentingan dan baru kemudian bersifat politis. Cabang-cabang Budi Utomo berusaha memperbaiki kondisi hidup orang-orang Jawa di Sumatera, baik di perkebunan-perkebunan maupun di diluarnya dalam masalah kebutuhan dasar

²³M. Said, *Sejarah Press di Sumatera Utara*, Medan: Waspada, 1976, hlm. 111.

²⁴Van Miert, *loc.cit.*, hlm. 293

seperti sandang, pangan, papan dan pendidikan serta perbaikan pelayanan dari sang majikan (Tuan Kebon)²⁵.

Kondisi hidup orang Jawa yang mengalami penindasan di perkebunan, menyebabkan sasaran utama program Budi Utomo adalah memberikan pelayanan dan pembelaan kepada nasib mereka. Para pengurus cabang Medan sering membicarakan kasus-kasus penderitaan yang dialami oleh buruh Jawa dengan Gubernur Pesisir Timur Sumatera. Cabang-cabang Budi Utomo tidak hanya peduli kepada para buruh Jawa di perkebunan, tetapi juga orang-orang Jawa bekas buruh perkebunan yang masih menetap di Tanah Deli.

Mereka umumnya kesulitan untuk mendapatkan tanah tempat pemukiman dan usaha pertanian. Mereka mengalami kesulitan untuk mendapatkan sebidang tanah dari Sultan atau penguasa lokal lainnya. Seringkali mereka hanya mendapatkan tanah hutan. Seudah mereka buka dan tempati selama beberapa tahun, masa sewa atas tanah itu berakhir, dan sesudah itu permintaan untuk memperpanjang sewa ditolak. Mereka hanya diperbolehkan menetap di hutan yang lain. Para pengurus Budi Utomo terlibat dalam masalah-masalah penyelesaian masalah itu dengan Gubernur. Para anggota Budi Utomo juga berhasil masuk dalam pengadilan-pengadilan negeri di Sumatera Timur²⁶.

Soemosoediro mempunyai visi yang baik mengenai pentingnya membuka sebanyak-banyak pemukiman orang Jawa di Sumatera Timur. Pada bulan Desember 1921 ia datang ke Solo untuk memperjuangkan cita-citanya itu dalam rapat serikat pekerja. Dalam rapat itu, beliau menjelaskan bahawa di Sumatera Timur sudah ada pemukiman orang Jawa seperti di Pematang Siantar. Ketika tamu datang ke sana, ia tidak akan merasa berada di Sumatera, melainkan di sebuah desa di Jawa. Di sana tinggal 600 orang Jawa dalam keadaan

²⁵Ibid., hlm. 293.

²⁶Ibid.

sangat makmur. Mereka menggarap sawah-sawah yang subur dengan irigasi yang teratur.

Tempat itu sangat bersih, sehingga dalam empat tahun tidak ada dijumpai warganya yang sakit. Pemukiman itu dilengkapi dengan sekolah. Pemukiman orang Jawa itu dapat memecahkan masalah kekurangan pangan. Dengan membuka banyak pemukiman orang Jawa seperti itu di Sumatera, maka Hindia Belanda akan tergantung kepada impor beras dari Siam, Burma dan Indo-Cina. Dengan demikian, pihak perkebunan tidak akan kesulitan mendapatkan tenaga buruh bebas, sebab akan disuplai dari pemukiman-pemukiman orang Jawa tersebut. Gubernur Sumatera Timur mendukung usaha Soemosoediro, namun upaya mencari pemukim seperti itu belum berhasil. Masih banyak orang Jawa yang ingin kembali ke Jawa daripada menetap di Sumatera Timur²⁷.

Gelombang baru pemukim Jawa tidak terwujud. Keberadaan cabang-cabang BU ternyata sangat tergantung kepada satu atau dua orang tokoh saja. Begitu mereka pergi, semangat itupun hilang. Cabang Budi Utomo menjadi tidak efektif dan anggota tidak lagi muncul, seperti yang terjadi di cabang Budi Utomo Lubuk Pakam tahun 1922. Pada akhir tahun itu, anggota Budi Utomo Lubuk Pakam tinggal 25 orang, ditinggalkan oleh 626 anggotanya tahun 1921. Setahun kemudian Budi Utomo Tebing Tinggi mengalami nasib yang sama; dari 451 anggota menjadi 54 anggota.

Pada akhir tahun 1924, Budi Utomo Cabang Medan mempunyai anggota 50 orang, Lubuk Pakam 25 anggota dan Tebing Tinggi 29 anggota. Tahun 1928 jumlah anggota Budi Utomo di Medan naik menjadi 97 orang, namun anggota Budi Utomo di Lubuk Pakam dan Tebing Tinggi turun menjadi 14 anggota dan 20 anggota.²⁸ Demikianlah catatan singkat tentang Budi Utomo di Sumatera Timur. Budi Utomo

²⁷*Ibid.*, hlm. 295

²⁸*Ibid.* hlm. 296.

akhirnya melebur ke dalam Parindra tahun 1935²⁹ mengikuti organisai induknya di Jawa.

Parindra Sumatera Timur dibentuk di Medan pada bulan Desember 1935³⁰. Dua tahun kemudian cabang Parindra didirikan di Binjai, Tebing Tinggi, Siantar, dan Kisaran. Medan dijadikan sebagai pusat aktivitas partai. Tokoh-tokoh Parindra Sumatera Timur antara lain Sutan Noer Alamsyah, S.M. Tarigan, Mr. Loeat Siregar, Sugondo Kartoprodjo, Dr. Pringadi. Kebijakan koperatif Parindra terlihat jelas dari hubungan partai itu dengan penguasa kolonial dan sultan-sultan Sumatera Timur. Sultan Langkat menawarkan fasilitasnya untuk mendirikan Parindra Langkat dan pada tahun 1936 dua orang wakil Parindra bersedia dipilih menjadi anggota Dewan Kota Praja Medan. Akibatnya Residen Sumatera Timur mengumumkan bahwa anggota Parindra tidak akan dikenakan larangan perjalanan dan Parindra bukanlah organisasi politik yang akan mengancam keamanan dan ketertiban.

“BUDI UTOMO” MODERN DAN PROBLEM MASA KINI

Meskipun Budi Utomo dikenal dalam sejarah pergerakan sebagai organisasi moderat, tetapi Budi Utomo adalah organisasi pertama yang mengkritik perlakuan buruk terhadap kuli kontrak di perkebunan Sumatera Timur. Budi Utomo adalah organisasi modern pertama yang membela kepentingan orang pribumi yang tertindas dalam sistem pemerintahan kolonial Belanda dan feodal di Sumatera Timur. Berdirinya Budi Utomo di Sumatera Timur secara langsung telah menghubungkan kegiatan politik antara Sumatera Timur dengan pusat aktivitas politik Hindia Belanda di Jawa.

²⁹Parindra (Partai Indonesia Raya) adalah fusi dari Budi Utomo dengan Persatuan Bangsa Indonesia (PBI) dalam kongresnya tanggal 24-26 Desember 1935 dan diketuai oleh Dr. Sutomo.

³⁰F.J.J. Dootjes, *Kroniek 1939*, hlm. 55.

Dalam konteks kekinian dan masa depan, program Budi Utomo di Sumatera Timur masih relevan untuk diteruskan mengingat pertama, masalah pertanahan di Sumatera Utara sampai hari ini belum selesai, bahkan konflik pertanahan semakin rentan terjadi dan menimbulkan korban jiwa. Konflik-konflik itu justru banyak terjadi di lahan eks HGU (tanah-tanah perkebunan) yang banyak dihuni oleh orang-orang Jawa. Kedua, keroposnya karakter bangsa yang ditandai dengan banyaknya pejabat publik yang terseret kasus korupsi. Ketiga, maraknya kriminalitas seperti perampokan, pembunuhan, geng motor, narkoba dan lain-lain yang melibatkan pemuda dan remaja dan merosotnya mutu pendidikan adalah bagian dari problem masa kini bangsa yang sebenarnya sudah diperjuangkan oleh Budi Utomo di masa lalu seperti yang dilakukan oleh Sugondo Kartoprodjo.

Sugondo Kartoprodjo adalah tokoh pergerakan dan pendidikan di Sumatera Utara yang sudah sejak jaman kolonial hingga kemerdekaan memiliki banyak jasa membangun karakter pejuang dan pendidikan di Sumatera Utara. Beliau adalah anggota Budi Utomo dan Parindra yang sukses membangun sekolah Taman Siswa di daerah ini. Taman Siswa menjalin hubungan yang harmonis dengan Partai Nasionalis Indonesia. Guru-guru Taman Siswa ada yang direkrut dari kalangan anggota PNI dan sebaliknya murid-murid Taman Siswa menjadi anggota PNI yang militan. Dari sinilah embrio nasionalisme bersemi dan menyebar ke Sumatera Timur. Sementara aspek pendidikan kesehatan masyarakat mendapat perhatian dari kalangan anggota Budi Utomo. Dr. Raden Pirngadi³¹ sebagai tokoh Budi Utomo kota Medan sudah berjasa dalam membangun dunia kesehatan di Sumatera Timur. Oleh sebab itu sejak tahun 1979 namanya diabadikan pada sebuah nama rumah sakit umum pemerintah yang terletak di Jl. Prof. H.M. Yamin, SH Medan, yakni Rumah Sakit Pirngadi.

³¹Pada tahun 1930 Dr. R. Pirngadi pernah menjabat sebagai wakil Kepala *Gementee Zieken Huis* (Rumah Sakit Kota) yang kemudian diubah namanya menjadi RSU Dr. R. Pirngadi tahun 1979. Tentang sejarah Rumah Sakit ini, baca, Umar Zein, <<http://www.blogger.com/profile>, 3 Juni 2010.

“Pewaris-pewaris” Budi Utomo yang dimotori oleh para sesepuh Jawa di Medan dan orang-orang Jawa yang menjadi pejabat publik di Medan membentuk Putera Jawa Kelahiran Sumatera (Pujakesuma³²). Pujakesuma secara ideal sebenarnya dibangun untuk mengangkat martabat orang-orang Jawa di Sumatera Utara baik secara sosial dan ekonomi. Namun sampai sejauh ini usaha itu belum berhasil.. Meskipun begitu, Pujakesuma bukanlah organisasi tertutup dan eksklusif bagi masyarakat Jawa saja. Ada etnik lain yang duduk dalam dewan kepemimpinan Pujakesuma.

Organisasi Pujakesuma yang dibentuk sejak 1980, sebagai organisasi terbesar orang Jawa di Sumatera Utara hanya terbatas kepada guyub saja. Masih sebagai wahana tempat kangen-kangenan para pejabat publik (orang Jawa) yang berasal dari Jawa dengan menangap wayang dan kesenian Jawa lainnya. Oleh karena itulah maka organisasi ini diplesetkan menjadi Putera Jawa Keluyuran di Sumatera. Ketika itu, tidak banyak kaum intelektual Jawa yang benar-benar lahir di Sumatera dilibatkan dalam kepengurusan organisasi, sehingga Pujakesuma tidak berkembang sebagai organisasi yang mengayomi dan mengangkat martabat orang Jawa di Sumatera Utara. Sejak reformasi, menyusul dibukanya kran demokrasi dan pemilihan umum, baik pemilihan anggota legislatif, gubernur dan bupati/walikota, Pujakesuma menjadi rebutan para kandidat yang bertarung dalam Pilkada, sebab penduduk Jawa yang mayoritas itu adalah lumbung suara yang signifikan untuk memenangkan pertarungan dalam setiap

³²Organisasi Pujakesuma dibentuk di Medan pada tanggal 10 Juli 1980. Kepengurusan organisasi ini mirip dengan Budi Utomo, yaitu para pegawai atau birokrat pemerintahan, karyawan swasta dan anggota Golkar. Pujakesuma pertamakali dipimpin oleh Raden Soeyono yang juga menjabat sebagai Kepala PU Provinsi Sumatera Utara. Namun keanggotaannya tidak terbatas untuk kelompok elite saja, namun diperuntukkan bagi semua orang Jawa keturunan kuli kontrak yang lahir di Deli dan juga mereka yang berkelana di Sumatera. Baca Ringgus Savard, *“Eksistensi Paguyuban Keluarga Besar Pujakesuma di Kota Medan (1980-1990)”* Skripsi Sarjana Jurusan Sejarah FIB USU, 2008, hlm. 39.

pemilihan umum. Konsekuensinya bermunculah organisasi-organisasi orang Jawa yang lain seperti PAJAR (Paguyuban Jawa Rembug) yang berafiliasi ke Partai Bintang Reformasi, PJB (Paguyuban Jawa Bersatu), Ikatan Keluarga Solo dan lain-lain.

Namun peran organisasi ini belumlah sebanding dengan apa yang telah ditorehkan oleh BU di Sumatera Timur. Hampir tidak ada pembelaan bagi nasib wong cilik yang berjuang mati-matian untuk mendapatkan hak penguasaan sebidang tanah di sekitar perkebunan demi menyambung hidup dari organisasi-organisasi ini, ternasuk juga perhatian kepada para anak-anak buruh yang terputus sekolah karena kekurangan biaya. Organisasi ini hanya besar gaungnya ketika dimulai pemilihan anggota legislatif, gubernur dan bupati/walikota, setelah itu meredup kembali. Tidak dipungkiri Pujakesuma banyak melakukan kegiatan dalam rangka mengembangkan budaya Jawa seperti ketoprak, ludruk, wayang, bahasa Jawa dan lain-lain. Tahun 1985, Pujakesuma pernah mengadakan festival wayang di Lubuk Pakam dan tahun 1990 perlombaan memasak kuliner Jawa di Medan. Memang dalam Raker Pujakesuma yang diadakan tahun 2012 menyusul terbentuknya dewan kepemimpinan Pujakesuma yang baru, sudah mulai dibahas upaya pendataan orang-orang Jawa yang putus sekolah di setiap desa. Namun sejauh ini belum terdengar realisasinya.

Sebagai catatan akhir, dimasa depan seharusnya setiap pemuda baik yang bergabung dalam organisasi baik politik maupun ormas, harus memberikan sumbangan pemikiran dan tindakan nyata bagi mengatasi problem bangsa seperti pemberantasan mental korup, kenakalan remaja (geng motor), narkoba dan lainnya sebagai upaya memperkuat karakter bangsa. Kalau hal ini dapat direalisasikan, maka kita telah memaknai dengan benar peringatan seabad lebih kehadiran Budi Utomo di Indonesia. Para pemuda yang bergabung dalam organisasi itu harus menjadi pelopor dalam mengatasi problem masyarakat dan bangsa Indonesia, dengan berkaca pada para pemuda yang 105 tahun dahulu telah bergabung dalam organisasi Budi Otomo atau

organisasi lainnya berhasil menanamkan benih-benih nasionalisme dengan memperkuat ketahanan budaya sebagai upaya memperkokoh jati diri bangsa. Ini perlu dilakukan untuk mengenyahkan semangat individualisme, premanisme, hedonisme, dan nepotisme dari tubuh bangsa Indonesia ke depan, sehingga kokohlah nasionalisme Indonesia.



**MUSEUM KEBANGKITAN NASIONAL
DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. Abdul Rahman Saleh No. 26 Jakarta Pusat 10410

Telp. (021) 34830033, Fax. (021) 3847975

Website: www.museumkebangkitannasional.go.id